

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



PENGARUH MEDIA SOSIAL PADA ERA GLOBALISASI TERHADAP NASIONALISME

Oleh:

R. EDI SETIAWAN

KOLONEL ARH NRP 1910045970470

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LX
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Pengaruh Media Sosial Pada Era Globalisasi Terhadap Nasionalisme”**.

Penentuan judul Taskap ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LX Tahun 2020 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LX di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Marsda TNI Bebas Irianto, S.H dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai selesai sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 21 Juli 2020

Penulis

R. Edi Setiawan, S.H.
Kolonel Arh NRP 1910045970470



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Edi Setiawan

Pangkat : Kolonel Arhanud

Jabatan : Paban VI/Minintel Spamad

Instansi : Mabesad

Alamat : Jalan Veteran No 2 Gambir Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan/Taskap yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



R. Edi Setiawan, S.H
Kolonel Arh NRP 1910045970470

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : R. Edi Setiawan, S.H.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX.
Judul Taskap : **Pengaruh Media Sosial pada Era Globalisasi terhadap Nasionalisme**

Taskap tersebut di atas telah ditulis sesuai dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 40 Tahun 2020, karena itu layak dan disetujui untuk diuji.

Jakarta, 21 Juli 2020

Tutor Taskap



Bebas Irianto, S.H
Marsekal Muda TNI

DAFTAR ISI

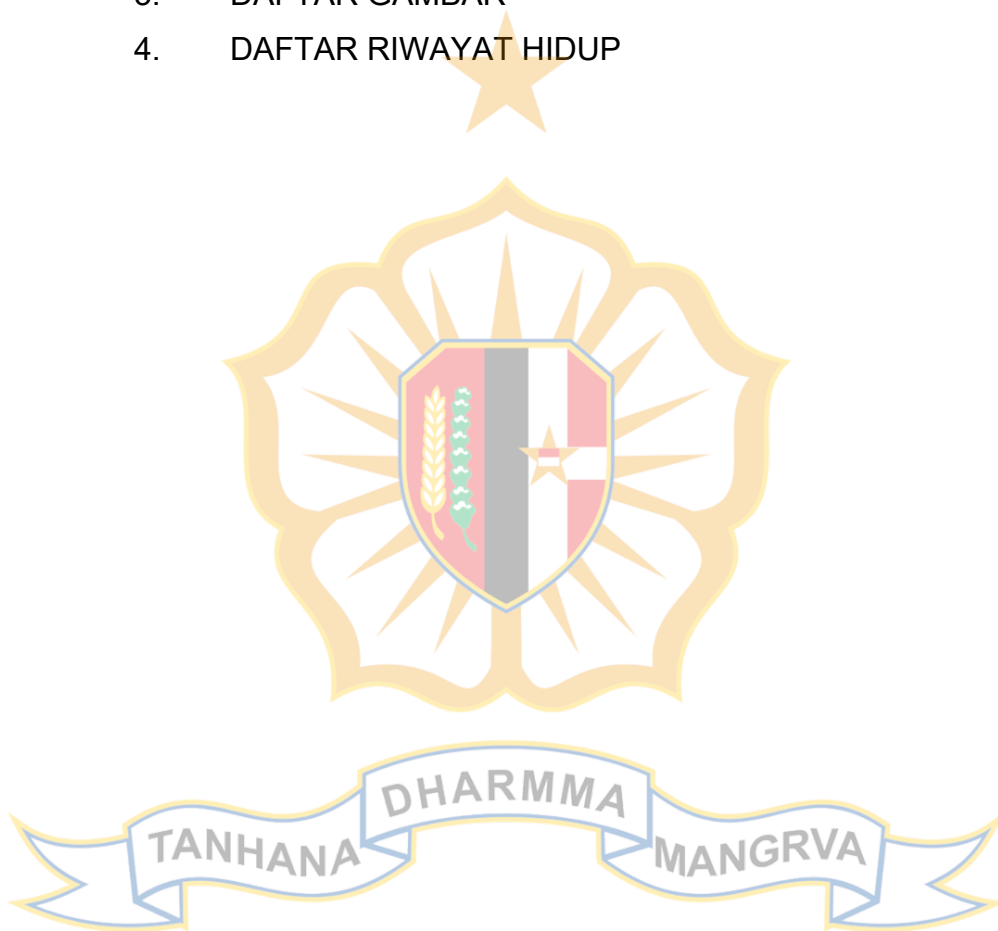
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	6
5. Metode dan Pendekatan.....	7
6. Pengertian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
7. Umum.....	10
8. Peraturan Perundangan-undangan.....	10
9. Kerangka Teoretis.....	12
10. Data dan Fakta.....	13
11. Lingkungan Strategis.....	19
BAB III PEMBAHASAN.....	24
12. Umum.....	24
13. Pengaruh penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat pada era globalisasi.....	24
14. Kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang diterima melalui media sosial.....	32
15. Pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku masyarakat terkait nasionalisme.....	40
16. Peran Pemerintah dalam mengurangi pengaruh negatif penggunaan media sosial terhadap nasionalisme.....	47

BAB IV	PENUTUP.....	57
	17. Simpulan.....	57
	18. Rekomendasi.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PENGARUH MEDIA SOSIAL PADA ERA GLOBALISASI TERHADAP NASIONALISME

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

a. Nasionalisme adalah suatu paham atau suatu ideologi yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap anggota bangsa merupakan bagian dari suatu bangsa yang besar. Tiap anggota bangsa berkewajiban mencintai dan membela negaranya atau dengan kata lain nasionalisme adalah rasa ingin mempertahankan negaranya dari ancaman baik yang datang dari internal maupun eksternal. Nasionalisme juga merupakan jiwa dan semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsanya agar tidak terjajah baik secara politik, ekonomi, budaya maupun militer.¹ Kata nasionalisme itu sendiri berasal dari kata *nation* dari bahasa latin ini kemudian diadopsi oleh bahasa-bahasa turunan latin seperti Perancis yang menerjemahkannya sebagai *nation* yang artinya bangsa atau tanah air. Bahasa Italia memakai kata *nascere* yang artinya “tanah kelahiran”. Sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan kata *nation* untuk menyebut “Sekelompok orang yang dikenal atau diidentifikasi sebagai entitas berdasarkan aspek sejarah, bahasa atau etnis yang dimiliki oleh mereka. Dalam konteks perang besar, nasionalisme yang tinggi adalah *center of gravity* atau pusat kekuatan non fisik yang mampu melipatgandakan kekuatan fisik para penduduk suatu negara. Nasionalisme adalah entitas cair yang tidak bisa di pagari oleh batas teritorial. Nasionalisme mengalir kemanapun sampai ke ujung bumi selama pribadi yang membawa nasionalisme tidak terpengaruh faktor-faktor eksternal. Namun pada kenyataannya nasionalisme suatu bangsa tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa pengaruh dari perkembangan global. Demikian juga luntur atau tidaknya nasionalisme suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Tantangan

¹ Bahan Ajar Lemhannas bidang studi Kewaspadaan Nasional, Cetakan Tahun 2020, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia : Jakarta, 2020

kekinian terhadap rasa nasionalisme ini semakin hebat dengan adanya globalisasi dan revolusi industri yang membuat dunia semakin sempit. Globalisasi membuat orang bebas bergerak dan berinteraksi dengan orang dari berbagai belahan dunia. Pada saat ini kita berada di era globalisasi dimana teknologi, informasi dan komunikasi semakin berkembang dan berinovasi dan menjadikan dunia menjadi tanpa batas. Era globalisasi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata menjadi ke dunia maya. Pada zaman yang serba modern seperti saat ini, kita diberi kemudahan mengakses berbagai informasi melalui Internet di mana saja dan kapan saja. Bahkan Internet bukanlah barang yang mahal karena dampak dari pembangunan yang semakin maju memudahkan kita untuk mengakses Internet.

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia sampai Januari 2019 diperkirakan sekitar 268,2 juta jiwa. Pengguna internet di Indonesia 150 juta orang dengan pengguna media sosial (Medsos) aktif sekitar 150 juta dan pengguna Medsos lewat telepon genggam sekitar 130 juta orang. Rata-rata penggunaan internet di Indonesia tiap harinya selama 8 jam 36 menit dengan berbagai peralatan. Sedangkan rata-rata penggunaan Medsos oleh mereka sekitar 2 jam 26 menit (Tabel Lampiran 2.2-2.4).² Maka tak heran bila saat ini nilai-nilai dan norma-norma sosial mulai terkikis akibat banyak orang lebih memilih bersosialisasi melalui Medsos. Medsos tidak hanya digunakan untuk berbagi momen-momen menyenangkan dan penting bagi penggunanya, tapi Medsos juga menjadi media informasi bagi banyak kalangan. Penggunaan Medsos saat ini adalah merupakan fenomena dari dampak globalisasi yang terjadi di dunia.

b. Fenomena global mengakibatkan pertumbuhan penggunaan Medsos semakin subur dan semakin pesat. Peran Medsos di era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial kehidupan masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. Akibat dari adanya Medsos ini secara langsung memunculkan perubahan didalam kehidupan masyarakat baik perubahan pada kebudayaan, perubahan pada gaya hidup masyarakat

² We are social Hootsuite, Digital Report 2019, diakses pada 2 Februari 2020, <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>

maupun perubahan-perubahan lainnya. Perkembangan penggunaan Medsos memang seharusnya diimbangi dengan kemampuan daya tangkap dan daya adaptasi masyarakat terhadap pengembangan teknologi informatika yang baru serta tingkat baca yang tinggi (literasi digital). Kita harus bisa segera beradaptasi dan mengenali bagaimana keadaan sekarang yang penuh dengan perubahan.

Namun ironisnya, ditengah penggunaan Medsos yang semakin pesat, justru menjadi akar masalah dari persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini yaitu masalah yang terkait dengan nasionalisme. Warga masyarakat yang seharusnya mencintai negaranya dengan senantiasa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa namun kenyataannya justru terbalik. Hal ini terjadi karena Medsos digunakan oleh banyak kalangan justru untuk menebar kebencian, hujatan, hasutan, informasi hoaks, ide-ide separatis dan khilafah serta paham radikal. Amat disayangkan Medsos yang menjadi simbol kebebasan masyarakat mengakses komunikasi dan informasi justru menjadi senjata makan tuan bagi persatuan negeri.

Saat ini kita dengan mudahnya dapat menjumpai akun-akun yang menebar kebencian atas nama kelompok, golongan, agama dan perorangan yang beredar luas di Medsos. Hujatan dan hasutan yang dilontarkan sangat mudah sekali mempengaruhi para warganet/netizen. Ada yang menanggapi dengan sikap positif, namun tak sedikit yang ikut terpancing dan bersikap negatif. Masalah yang ada di Medsos justru ikut terbawa hingga ke dalam kehidupan masyarakat. Perilaku masyarakat di Medsos tidak lagi mencerminkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang dikenal rukun, santun dan ramah. Nilai ke-Indonesiaan telah memudar bahkan sirna seiring cepatnya perkembangan teknologi informasi. Kebebasan dalam sebuah negara demokrasi sebenarnya bukanlah kebebasan yang terjadi seperti saat ini. Di mana kita bebas melontarkan hujatan, celaan atau provokasi terhadap pihak lain. Kebebasan yang terjadi saat ini malah membuat kita tidak mau diatur dan tunduk pada peraturan. Kita merasa paling benar, paling hebat dan paling tahu. Kebebasan yang ada tidak menimbulkan rasa sadar diri akan nasionalisme, namun malah melahirkan sikap fanatik yang sempit. Inilah yang mengakibatkan paham-

paham garis keras atau radikal tumbuh subur di Indonesia. Amat memprihatinkan bila kebebasan di negara kita yang tidak dibarengi dengan pengetahuan menjadi lahan subur bagi paham radikal.

Di sisi lain, masuknya budaya asing ke Indonesia juga sangat cepat perkembangannya. Masuknya budaya luar melalui Medsos sangat mempengaruhi perkembangan budaya Indonesia. Jika kebudayaan asing yang bersifat negatif memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama para generasi muda tanpa diimbangi upaya pelestarian nilai-nilai budaya bangsa dikhawatirkan bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri sebagai bangsa. Jika pengaruh-pengaruh di atas dibiarkan, maka moral generasi bangsa menjadi rusak dan akan timbul tindakan anarkis yang memecah persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai nasionalisme akan terkikis karena sudah mulai berkurang rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat, padahal generasi muda adalah penerus masa depan bangsa.

c. Dalam menghadapi pengaruh negatif Medsos ini sebenarnya Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam membatasi pengguna sosial media dalam berujar. Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 melarang muatan informasi terkait asusila, pencermaran nama baik, perjudian, pemerasan serta ancaman. Dalam Pasal 28 melarang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras dan antara golongan (SARA). Kemudian Kapolri pun telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat Edaran tersebut disamping ditujukan kepada masyarakat luas untuk membatasi, menjaga diri dalam mengisi ruang publik di Medsos juga sebagai pedoman kepolisian dalam penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membuat program SiBerKreasi dengan melibatkan masyarakat, SiBerkreasi merupakan gerakan nasional untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu penyebaran

konten negatif melalui internet seperti hoaks, *cyberbullying* dan *online radicalism*.

Namun itu semua masih diperlukan peran para tokoh masyarakat, keluarga, tokoh pendidikan, tokoh agama dan tokoh adat, swasta, LSM juga gerakan pemuda memiliki peran penting untuk memelihara dan mengobarkan sikap dan rasa nasionalisme untuk membentengi dari dampak negatif dari Medsos. Tantangan dan hambatan-hambatan harus kita olah menjadi peluang dan optimisme guna mewujudkan nasionalisme masyarakat yang kuat dan kokoh. Penggunaan *one gate system* dalam menangani permasalahan sosial politik di Medsos contohnya. *One gate system* ini sendiri bukan sistem yang asing di Indonesia dimana sistem ini sudah digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melawan hoaks pada kasus bencana erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2010. *One gate system* sendiri adalah sebuah sistem dimana ketika terjadi suatu kejadian, stakeholder dalam hal ini Pemerintah melakukan pemberitaan secara langsung dan secara berkala sehingga hoaks yang beredar di masyarakat hanya beredar di selang waktu tersebut. Sebenarnya hoaks itu sendiri ada dikarenakan terjadinya kekosongan informasi di masyarakat. Jika kekosongan tersebut dapat diisi oleh Pemerintah maka masyarakat sendiri akan lebih mempercayai berita dari sumber yang kredibel. Upaya inilah yang diharapkan menjadi salah satu upaya disamping berbagai program yang bersifat inovasi dari Pemerintah Indonesia dalam mengurangi pengaruh Medsos terhadap nasionalisme.

2. **Rumusan Masalah.** Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah bagaimana pengaruh Medsos pada era globalisasi terhadap nasionalisme yang dikembangkan dengan beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut :
 - a. Apa pengaruh penggunaan Medsos dalam kehidupan masyarakat pada era globalisasi?
 - b. Bagaimana kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang diterima melalui Medsos?

- c. Apa pengaruh penggunaan Medsos terhadap perilaku masyarakat terkait nasionalisme?
- d. Bagaimana peran Pemerintah dalam mengurangi pengaruh negatif penggunaan Medsos terhadap nasionalisme?

3. **Maksud dan Tujuan.**

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini untuk memberikan gambaran dan menganalisa permasalahan pengaruh penggunaan Medsos pada era globalisasi terhadap nasionalisme di Indonesia serta memberikan solusi pemecahannya.
- b. **Tujuan.** Tujuan dari penulisan Taskap ini sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Pemerintah atau Lembaga Pemangku Kebijakan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut tentang bagaimana menjaga nasionalisme masyarakat Indonesia dari pengaruh penggunaan Medsos pada era globalisasi.

4. **Ruang Lingkup dan Sistematika.**

- a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup dari penulisan Taskap ini dibatasi pada upaya untuk menjaga nasionalisme masyarakat Indonesia dari pengaruh negatif penggunaan Medsos pada era globalisasi.
- b. **Sistematika.** Sistematika tulisan atau tata urutan penulisan Taskap ini disusun sebagai berikut :
 - 1) Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang nasionalisme, pengaruh Medsos pada era globalisasi terhadap nasionalisme serta beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengurangi pengaruh negatif penggunaan Medsos agar pembaca memahami latar belakang penulisan, permasalahan secara umum yang akan dibahas, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian-pengertian.
 - 2) Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini memberikan gambaran tentang berbagai landasan hukum/perundang-undangan yang masih berlaku sebagai dasar dalam penulisan, dilengkapi dengan data dan fakta, teori-teori sebagai pisau analisis atau kerangka berpikir penulis

serta pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap pengaruh Medsos terhadap nasionalisme masyarakat Indonesia.

3) Bab III Pembahasan. Pada bab ini merupakan pembahasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan kajian. Penulis menganalisis secara komprehensif dan integral data dan fakta yang ada berdasarkan teori dan perundang-undangan sehingga dari pembahasan tersebut di dapatkan faktor penyebab masalah dan solusinya.

4) Bab IV Penutup. Pada bab ini berisi simpulan yang menguraikan secara ringkas tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kajian disertai rekomendasi berupa saran dalam mengurangi pengaruh negatif Medsos pada era globalisasi terhadap nasionalisme di Indonesia.

5. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Pembahasan dan penulisan Taskap ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu melakukan pengumpulan dan analisa penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur/studi kepustakaan dari data sekunder yang diperoleh Penulis.

b. **Pendekatan.** Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan empiris dengan perspektif kepentingan nasional dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. **Pengertian.** Dalam penulisan Taskap ini dilengkapi dengan beberapa pengertian guna menyamakan dan memudahkan dalam pemahaman baik berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) maupun literatur lainnya sebagai berikut :

a. **Dunia Maya.** Dunia maya atau disebut juga ruang siber (*cyberspace*) adalah integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.³ Dengan demikian tidak

³ Cyberculture, The key Concepts, diedit oleh David Bell, Brian D.Loader, Nicholas Pleace and Douglas Schuler

salah jika KBBI menyebutkan dunia maya adalah ruang informasi dan komunikasi dalam internet.⁴

b. **Era Globalisasi.** Saat ini adalah era globalisasi dimana di dalam lingkungan global terjadi interkoneksi pengaruh dari faktor-faktor politik, teknologi, budaya dan ekonomi. Hal itu difasilitasi oleh kemajuan komunikasi dan teknologi sedemikian rupa sehingga menghasilkan *uncertainty, complexity* dan *competition*.⁵

c. **Internet.** Internet merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.⁶

d. **Literasi.** Literasi menurut KBBI adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis.⁷

e. **Literasi Digital.** Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengkomunikasikan konten/informasi dengan kecakapan kognitif (daya pikir dalam menilai konten) dan teknis.⁹

f. **Masyarakat.** Adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu serta lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat juga merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, Pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait

⁴KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dunia%20maya>

⁵ Silalahi, T. B. 2010. Kepemimpinan Visioner Dalam Rangka Reformasi Birokrasi. Materi Ceramah Kepemimpinan, Lemhannas RI, 7 Juli 2010. Jakarta

⁶ KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet>

⁷ KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>

⁸ Literasi Digital (Gerakan Literasi Nasional). 2017. Jakarta: Sekretariat TIM GLN Kemdikbud. hlm. 8.

⁹ Kerangka Literasi Digital. 2018. Jakarta: Kemenkominfo Publisher. hlm. 4 - 5. ISBN 9786025132421.

satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi dan saling ketergantungan.¹⁰

g. **Media Sosial (Medsos).** Media sosial adalah sebuah media online yang mendukung interaksi sosial yang menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan Medsos sebagai "Sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".¹¹

h. **Pemerintah.** Menurut Ermaya Suradinata (dalam Nina Minawati) Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.¹² Dengan demikian Pemerintah dapat diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya¹³

i. **Pengaruh.** adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹⁴



¹⁰ Jabrohim. 2004. Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Masyarakat UAD. hlm 167

¹¹ Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Sosial media". Business Horizons 53(1): 59–68.

¹² Nina Minawati Muhaemin, "Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan". <https://www.slideshare.net/Muhaemin93/pengertian-Pemerintah-dan-Pemerintahan> Diunduh pada tanggal, 29 Maret 2020

¹³ KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemerintah>

¹⁴ KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh>

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. **Umum.** Dalam tinjauan pustaka ini berisi kumpulan semua pustaka yang digunakan sebagai sumber rujukan untuk melakukan pembahasan. Dalam bab ini membahas mengenai semua faktor yang berpengaruh terhadap pertanyaan kajian dan digunakan dalam menganalisis seperti peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, data dan fakta serta lingkungan strategis.

8. **Peraturan Perundang-undangan.** Dalam penulisan Taskap ini ada berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan pada pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, sebagai pedoman mengenai bela negara.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut :

1) Pasal 4 ayat (5) berbunyi “Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat”.

2) Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

3) Pasal 11 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi”.

4) Pasal 13 ayat (1) berbunyi “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.

c. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 2 berbunyi “Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas

pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

d. Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pada pasal 42 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia”.

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.”

f. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 40 ayat (2) berbunyi “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomasi No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif pada pasal 2 huruf b menyebutkan bahwa tujuan peraturan menteri ini adalah “Melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan”. Pada pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa jenis situs internet yang bermuatan negatif yang ditangani Kemenkominfo adalah pornografi dan kegiatan ilegal lainnya yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Peraturan ini merupakan cikal

bakal dari Gerakan Literasi Nasional (GLN) adalah induk gerakan literasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Fokus utama GLN meliputi literasi dasar yang terdiri atas enam aspek, yaitu literasi baca-tulis, numerasi, sains, finansial, digital dan budaya & kewarganegaraan.

i. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat Edaran tersebut disamping ditujukan kepada masyarakat luas untuk membatasi dan menjaga diri dalam mengisi ruang publik di Medsos juga sebagai pedoman kepolisian dalam penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*.

9. **Kerangka Teoretis.** Dalam penulisan Taskap ini ada beberapa konsep dan teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisa data dan fakta sebagai berikut :

a. **Konsep Keamanan Nasional.** Keamanan Nasional tidak hanya menjadi Keamanan Negara saja, namun Keamanan Nasional secara kontemporer mempunyai pengertian yang lebih luas tidak hanya segi ancaman militer saja, tetapi juga ancaman-ancaman non militer. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia disebutkan bahwasanya ancaman non militer berupa ancaman yang menggunakan faktor nir-militer yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi serta keselamatan umum.

b. **Konsep Potensi Ancaman.** John M. Collins berpendapat bahwa dalam mengevaluasi ancaman terdapat tiga pertimbangan yang berpengaruh, yaitu : pertama, dengan cara menilai kemampuan (*capabilities*); kedua, intensitasnya (*intension*) dan ketiga, kemudahan untuk dapat diserang (*vulnerabilities*). Jadi secara umum terminologi ancaman dapat dimaknai sebagai preskripsi-indentifikatif bahwa setiap bentuk, perilaku, usaha ataupun kegiatan yang membahayakan kedaulatan, persatuan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa.

c. **Konsep Literasi.** Ali Romdhoni menyatakan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan. Hal ini sejalan dengan Richard Kern yang

menjelaskan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis atau memiliki kesamaan arti dengan belajar dan memahami sumber bacaan.

d. **Konsep Penta Helix.** Sebuah konsep yang merupakan pengembangan dari konsep Triple Helix yang digagas oleh Etzkowitz dan Leydesdorf (2000). Model atau konsep ini merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait (Pemerintah, Akademisi, Swasta, Masyarakat dan Media) didalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan.

e. **Teori Literasi Digital.** Paul Gilster dalam teori Literasi Digital mendefinisikan bahwa literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karier dan kehidupan sehari-hari. Bawden memperluas pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi.

f. **Teori *one gate system*.** Yono Reksoprodjo dalam teori tersebut menjelaskan bahwasanya pemilik otoritas melakukan pemberitahuan atau pengumuman secara langsung dengan rentang waktu tertentu, sehingga berita hoaks yang beredar hanya dipercaya di rentang waktu sebelum informasi dari pemilik otoritas diumumkan.

g. **Teori Perubahan sosial.** Selo Soemardjan dalam teorinya menyatakan bahwa perubahan sosial meliputi segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori perubahan sosial yang disampaikan oleh Moore yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, yaitu pola-pola perilaku dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.

10. **Data dan Fakta.** Beberapa data dan fakta aktual yang terkait / relevan dengan pertanyaan kajian berupa data sekunder antara lain sebagai berikut:

a. **Pengaruh penggunaan Medsos dalam kehidupan masyarakat pada era globalisasi.** Di era globalisasi sekarang, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat dari berbagai kalangan dan usia mulai anak-anak,

remaja sampai orang tua sudah pasti mengenal dan bersentuhan secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya dengan Medsos sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Lahirnya Medsos menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Pengaruh penggunaan Medsos telah mendorong berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat antara lain mencakup pada perubahan gaya berkomunikasi, penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, pola interaksi, penampilan dan pola kebiasaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tapi yang pasti penggunaan Medsos yang tidak bijak akan menimbulkan sifat candu yang dapat mengakibatkan sifat penggunanya menjadi autis, lebih mementingkan diri sendiri, menutup diri dari lingkungan sehingga susah untuk bersosialisasi seperti yang terlihat pada data dan fakta berikut :

- 1) Dari penelitian Bangkit Ary Tama pada Jurnal Gaster mengenai dampak sosial intensitas penggunaan Medsos terhadap kesehatan mental berupa sikap apatis di SMP Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini melibatkan 120 orang siswa yang diambil dari 3 SMP dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memiliki sikap apatis sebesar 53.3%. Penggunaan Medsos mempengaruhi komunikasi siswa dan mengakibatkan keterbatasan dalam berinteraksi secara langsung sehingga kurang sosialisasi.¹⁵
- 2) Dengan menyebarnya Covid-19 yang mulai membatasi pergerakan manusia, Bank Indonesia (BI) melihat adanya peningkatan jumlah transaksi pembelian lewat e-commerce/Medsos pada bulan Maret 2020. Menurut Data BI , transaksi pembelian lewat e-commerce/Medsos meningkat 18,1% menjadi 98,3 juta transaksi dan total nilai transaksinya meningkat 9,9% menjadi Rp 20,7 triliun.¹⁶
- 3) Pada penelitian Tira Fitria Wardhani mengenai pemanfaatan sosial media sebagai sarana komunikasi keluarga dalam upaya

¹⁵ Bangkit Ary Pratama dan Defie Septiana Sari. 2020. Dampak Sosial Intensitas Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Berupa Sikap Apatis Di SMP Kabupaten Sukoharjo. GASTER Vol. 18 No. 1. ISSN 1858-3385

¹⁶ Kontan, BI catat jumlah transaksi e-commerce selama wabah corona tumbuh signifikan, 30 April 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-catat-jumlah-transaksi-e-commerce-selama-wabah-corona-tumbuh-signifikan>

meminimalisir perilaku menyimpang pada masyarakat di Surabaya. Dari 50 narasumber penelitian, 23 orang menggunakan sosial media untuk relationship, 15 orang untuk bisnis online-shop nya, 7 orang untuk bekerja dan sisanya untuk bersenang-senang semata. Prioritas penggunaan sosial media dalam kehidupan sehari-hari memang beragam. Hal ini yang membuat beberapa orang tua juga terkena sindrom apatis dikarenakan hanya terlalu fokus pada gawai yang mereka gunakan.¹⁷

b. **Kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang diterima melalui Medsos.** Pada saat ini Medsos sudah merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan masyarakat dalam menyaring / memverifikasi informasi yang masuk melalui Medsos. Namun pada kenyataannya kemampuan masyarakat kita dalam menyaring informasi yang masuk melalui Medsos masih rendah, sehingga mengakibatkan masyarakat masih mudah untuk mempercayai berita bohong/hoaks, mudah terprovokasi/terhasut dan kemudian melakukan tindakan yang melawan hukum seperti melakukan mobilisasi massa untuk melakukan pengusakan dan pembakaran seperti yang terlihat pada data dan fakta berikut ini :

1) Data dari *Centre for International Governance Innovation* (CIGI) IPSOS 2017 menunjukkan dari sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia, 65%-nya ternyata masih mudah terhasut berita bohong. Hal ini bisa dilihat pada fakta hoaks tentang guru yang mengucapkan kata-kata rasis picu kerusuhan di Wamena. Demonstrasi tolak rasisme sebagai bentuk solidaritas yang digelar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 23 September 2019 berakhir anarkis. Terjadi pembakaran 4 sepeda motor dan bangunan serta fasilitas publik lainnya oleh massa sehingga menimbulkan keresahan. Masyarakat masih mudah terhasut dan terprovokasi dengan berita hoaks. Demostrasi dipicu karena adanya hoaks

¹⁷ Tira Fitriawardhani. 2017. Pemanfaatan Sosial Media sebagai Sarana Komunikasi Keluarga Dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang Pada Masyarakat di Surabaya. Cakrawala Jurnal. Vol 11. No 2

tentang seorang guru yang mengeluarkan kata-kata rasis terhadap muridnya yang asli Papua, namun setelah di konfirmasi oleh pihak Kepolisian ternyata guru tersebut tidak mengeluarkan kata-kata yang bersifat rasis terhadap muridnya.

2) Riset yang dilakukan oleh *Central Connecticut State Univesity* pada Maret 2016 bertajuk *World's Most Literate Nations Ranked* menyatakan Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Bostwana (61).¹⁸ Data ini didukung hasil riset UNESCO yang menyebutkan Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah dengan minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca.¹⁹

c. **Pengaruh penggunaan Medsos terhadap perilaku masyarakat terkait nasionalisme.** Pengaruh negatif dari Medsos telah berdampak pada tumbuhnya perilaku masyarakat yang mencerminkan memudarnya sikap nasionalisme. Masyarakat yang seharusnya mencintai negaranya dengan senantiasa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa namun kenyataannya justru saling bertikai antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena Medsos digunakan oleh banyak kalangan justru untuk menebar kebencian, memecah belah persatuan, hujatan, hasutan, informasi hoaks dan bahkan untuk mengembangkan ide-ide separatis dan khilafah serta paham radikal. Perilaku masyarakat di Medsos tidak lagi mencerminkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang dikenal rukun, santun dan ramah. Nilai-nilai ke-Indonesian telah memudar bahkan sirna seiring cepatnya perkembangan teknologi informasi. Hal ini bisa dilihat pada data dan fakta sebagai berikut :

1) Pertikaian antar warga desa karena terprovokasi kabar bohong (hoaks) di Medsos. Pada tanggal 10 Januari 2017 seratus lebih warga dari tiga desa, masing-masing Desa Parean Girang,

¹⁸ Kemenkominfo, TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos, 10 oktober 2020, https://www.kemenkominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-Medsos/0/sorotan_media

¹⁹ Data UNESCO 2016.

Bulak dan Ilir Kecamatan Kandanghaur menyerang desa Curug Kecamatan Kandanghaur. Saat melakukan penyerangan, ratusan warga dari tiga desa itu membawa senjata, seperti golok, arit hingga balok kayu. Walaupun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 90 rumah warga desa Curug mengalami kerusakan. Kepala Kepolisian Resor Indramayu Ajun Komisaris Besar Eko Sulistyو mengatakan penyerangan bermula dari munculnya isu provokasi di media sosial yang seolah-olah warga desa Curug menantang warga desa Parean.²⁰

2) Anggi mantan TKW yang pernah bekerja di Hongkong merupakan narapidana teroris yang pernah merencanakan pengeboman di Jakarta dan Bandung. Anggi bukan termasuk orang yang agamis dan tak pernah mengikuti pengajian di Taman Victoria Hongkong yang menjadi tempat berkumpulnya para TKW. Sejak Desember 2016 Anggi mulai terpapar radikalisme melalui Medsos. Dia bergabung di 60 channel Telegram dan sekitar 30 chat room. Sekitar Maret 2017, ia mengunggah video di Facebook dimana berbaiat kepada pimpinan ISIS, Abu Bakar Al Baghdadi. Setelah ketahuan ia dideportasi Pemerintah Hongkong dan akhirnya ditangkap Densus 88 pada Agustus 2017.²¹

3) Pada hari Selasa 4 September 2018 di halaman depan kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) telah ditangkap sebanyak 34 orang mahasiswa USTJ oleh aparat kepolisian karena diduga terlibat gerakan separatisme Papua Merdeka. Penangkapan tersebut ada kaitannya dengan aksi gerakan Papua Merdeka karena menyebarkan selebaran kegiatan United Liberation Movement For West Papua (ULMFWP) kepada masyarakat dengan menggunakan Medsos. Isi selebaran itu menyerukan agar pelajar dan pegawai serta masyarakat meliburkan

²⁰ Tempo.co, Terprovokasi Kabar Hoax, Warga 3 Desa Serang Desa Curug, 10 Januari 2017, <https://nasional.tempo.co/read/834604/terprovokasi-kabar-hoax-warga-3-desa-serang-desa-curug/full&view=ok> diakses pada 20 Juni 2020

²¹ Merdeka.com, Kelompok teroris manfaatkan media sosial sebarkan radikalisme, 16 Mei 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kelompok-teroris-manfaatkan-media-sosial-sebarkan-radikalisme.html> diakses pada 20 Juni 2020

diri dan ikut berkumpul untuk aksi damai menyerukan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua (Lampiran Gambar 3.1-3.3).²²

d. **Peran Pemerintah dalam mengurangi pengaruh negatif penggunaan Medsos terhadap nasionalisme.** Pemerintah memang tidak membatasi hak berekspresi masyarakat dalam menggunakan Medsos, tetapi Pemerintah wajib membuat kebijakan, regulasi maupun program kegiatan dalam rangka mengantisipasi pengaruh negatif Medsos dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan merugikan. Dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap konten informasi yang bersifat mencemarkan nama baik, memecah belah persatuan, pornografi, kebohongan yang merugikan publik, maupun paham radikalisme dan terorisme yang dapat melunturkan jiwa nasionalisme masyarakat. Berbagai kebijakan dan pembuatan regulasi serta program implementasinya sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah, namun pada kenyataannya output yang diharapkan belum dapat diwujudkan secara optimal karena adanya beberapa kendala dan kelemahan yang ada di berbagai sektor. Hal ini dapat dilihat dari data dan fakta sbb :

- 1) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 2019 menemukan hampir 200 hoaks berhubungan dengan kesehatan setiap harinya dan harus menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan untuk masuk dalam kategori hoaks atau penipuan kesehatan.
- 2) Pada kasus kobocoran 1 juta data pengguna Facebook Indonesia pada tahun 2018, Pemerintah hanya bisa melakukan sanksi administratif dan peringatan kepada Facebook mengenai hal tersebut. Selanjutnya menyerahkan kepada Facebook Indonesia untuk

²² Tribun.com, Ada Gerakan Separatis di Medsos, Fadli Zon Tegur Jokowi: TNI Polri Jangan Dipakai Alat Politik, 9 September 2018, <https://www.tribunnews.com/2018/09/09/ada-gerakan-separatis-di-medsos-fadli-zon-tegur-jokowi-tni-polri-jangan-dipakai-alat-politik> diakses pada 20 Juni 2020

melakukan audit internal.²³ Hal tersebut terjadi dikarenakan Indonesia tidak memiliki peraturan perlindungan data pribadi.

3) Survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2019 menemukan penyebaran konten radikalisme di media sosial sangat masif. Konten-konten itu didominasi oleh empat jenis konten keagamaan. Survei yang dilakukan sejak April-Juli 2019 mendapati Indeks diseminasi Medsos atau penyebaran konten yang memicu radikalisme secara nasional berada pada skor 38,33 (skala 0-100). Sedangkan pada Indeks Kontra Radikal secara nasional hanya ada di angka 11,68. Indeks tersebut masuk dalam kategori sangat rendah. Perilaku Kontra Narasi dengan penyebarluasan pesan-pesan perdamaian melalui media elektronik juga hanya di angka 5,85.²⁴

11. Lingkungan Strategis.

a. Global.

1) Pemanfaatan Medsos pada kampanye-kampanye politik di luar negeri. Untuk kasus luar negeri kita tidak bisa lewatkan sepaik terjang dari Cambridge Analytica. Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultan politik asal Inggris yang membantu kliennya di sejumlah negara dengan mengkombinasikan penyalahgunaan data, penambangan data, broker data dan analisis data dengan komunikasi strategis selama masa pemilihan. Khususnya ketika mereka memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik AS sebagaimana yang dibuktikan dengan masuknya dana sebesar \$15 juta dari milyader Republikan, Robert Mercer. Dari situ, mereka lantas menggarap kampanye senator Ted Cruz sebelum akhirnya turut serta dalam kemenangan Trump pada 2016. Setelah kesuksesan Trump, Cambridge Analytica melebarkan sayapnya hingga ke Kenya. Mereka aktif dalam kampanye Uhuru Kenyatta dalam pemilu 2017. Selain Kenya, Cambridge Analytica juga

²³ Tirto.id, Kebocoran Data: Perlukah Pemerintah Memberi Sanksi Facebook?, <https://tirto.id/kebocoran-data-perlukah-Pemerintah-memberi-sanksi-facebook-cHme>

²⁴ Republika, Radikalisme di Medsos, BNPT Petakan 4 Konten Keagamaan, 11 Desember 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/q2b4os428/radikalisme-di-medsos-bnpt-petakan-4-konten-keagamaan>, diakses pada 20 Juni 2020

menggarap proyek pemilu di Kolombia, India serta St Kitts & Nevis. Untuk kasus Trump, mereka membuat lebih dari 100.000 situs web yang dirancang khusus untuk berbagai profil psikologis dan preferensi dari kelompok-kelompok kecil targetnya. Hal ini disebut dengan *microtargeting*. Untuk menyebarkan link ke situs tersebut, mereka membayar \$2 juta untuk dollars Facebook ads, yang mengarahkan pengguna ke website-website tersebut. Ratusan ribu website tersebut dibuat sekontroversial mungkin, sesuai dengan kecenderungan user yang ditarget, terkadang menggunakan *fake news*, *black campaign* dan berbagai *clickbait*.²⁵

2) Penyebaran paham radikal ISIS lewat Medsos. Pesan-pesan yang bermuatan radikalisme mudah diperoleh dari konten di situs *online* ataupun di Medsos. Anak-anak muda menjadi radikal atau bahkan bergabung dengan kelompok militan melalui ajakan di Medsos. Pada tahun 2017 ada tiga remaja perempuan Inggris pergi ke Suriah melalui Turki dengan melewati jalur darat. Dalam rekaman CCTV siswi-siswi akademi Bethnal Green ini berada di stasiun bis hendak pergi ke Suriah. Ketiga siswi tersebut adalah Shamima Begum (15 tahun), Kadiza Sultana (16 tahun) dan seorang lainnya yang tidak disebutkan namanya berusia umur 15 tahun terbang menuju Turki dari bandara Gatwick London. Kekhawatiran mereka bergabung dengan kelompok militan yang menyebut diri Negara Islam atau ISIS disampaikan oleh Richard Walton pimpinan kepolisian Metropolitan London. Kepolisian mendeteksi mereka melakukan komunikasi dengan salah seorang perempuan Inggris yang berada di Suriah bernama Aqsa Mahmood melalui Medsos. Aqsa meninggalkan rumahnya di Glasgow Skotlandia untuk bergabung dengan ISIS di Suriah pada 2013. Penggunaan Medsos dalam perekrutan ISIS juga dilakukan oleh pendukungnya di Indonesia, dimana Santoso yang merupakan pemimpin jaringan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur menyampaikan dukungan

²⁵ M.Urfah, "Menguak Cambridge Analytica" <https://idbigdata.com/official/menguak-skandal-cambridge-analytica/>, diakses pada 20 Juni 2020

terhadap pimpinan ISIS Abu Bakar Al Bahgdadi melalui Medsos YouTube.

b. **Regional.**

1) Kasus Genosida Rohingya di Myanmar diakibatkan kesalahan mesin pencari di Facebook. Tim investigasi PBB untuk kasus Rohingya di Myanmar mengatakan bahwa Facebook terindikasi memiliki andil dalam terciptanya kerusuhan dan persekusi yang mengakibatkan sekitar ribuan orang meninggal dan lebih dari 650 ribu orang mengungsi dari Rakhine Myanmar sejak Agustus 2017 lalu. Anggota tim investigasi Yanghee Lee menyebutkan bahwa Facebook punya popularitas tinggi di Myanmar dan membuatnya jadi faktor kunci penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) yang menyasar kelompok Rohingya. Pada 2011 Pemerintah Myanmar memutuskan untuk melonggarkan akses informasi yang berdampak pada terbukanya akses internet, turunnya harga kartu SIM ponsel (dari yang semula \$3.000 menjadi \$1) serta meledaknya penggunaan teknologi seluler. Salah satu pihak yang diuntungkan dari keterbukaan ini adalah Facebook. Setelah akses informasi dilonggarkan dan teknologi seluler mulai berada di masyarakat Myanmar, Facebook mendapatkan sekitar 30 juta pengguna dalam kurun waktu 2014 sampai sekarang. Tingginya angka tersebut memperlihatkan antusiasme masyarakat dalam beraktivitas di Facebook. Menurut masyarakat Myanmar, Facebook adalah internet dan begitu juga sebaliknya. Namun ada harga yang harus dibayar untuk akses internet di Myanmar. Tej Parikh pada media *The Diplomat* menyebut tingginya akses internet dan Facebook di Myanmar turut meningkatkan sentimen terhadap minoritas Rohingya yang digulirkan oleh biksu-biksu ultra-nasionalis. Lewat internet terutama Facebook, mereka menyebar hoaks sampai ujaran kebencian yang pada akhirnya mampu membentuk skeptisisme masyarakat akan keberadaan Rohingya. Dari kebencian kelompok tertentu menjadi kebencian berskala nasional dan Facebook adalah media penyalurnya.

2) Kasus *Cyberhate* dan *Hoaks* di situs *The Real Singapore* (RTS). Sebelum Singapura mempunyai Undang-Undang anti hoaks bernama *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill*. Fenomena hoaks dan *cyberhate* juga pernah terjadi di Singapura. Pada tahun 2016, pasangan suami istri bernama Yang Kaiheng dan Ai Takagi pemilik situs populer *The Real Singapore* (TRS) dipidanakan oleh pihak berwajib Singapura, karena mereka mempublikasikan artikel-artikel hoaks yang menyudutkan warga negara asing di Singapura dan berpotensi memicu ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain (*xenophobia*).

c. **Nasional.**

1) Perkembangan penyebaran paham radikal dan separatis melalui Medsos di Indonesia. Paham radikal dan separatis berkembang di Indonesia disebabkan salah satunya karena posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis, dimana banyak orang asing dan ideologi baru masuk di negara ini. Banyaknya masalah internal di suatu daerah di dukung dengan masuknya paham-paham baru melalui Medsos dan sifat orang Indonesia yang terbuka terhadap orang asing sehingga memberi ruang dan pemikiran baru yang dapat membahayakan keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Separatisme sangat berbahaya karena memiliki keinginan untuk memisahkan diri atau merdeka dari NKRI. Oleh karena itu separatisme perlu diatasi secepatnya karena jika dibiarkan dan diakui oleh beberapa negara akan menjadi permasalahan yang serius dan bisa melakukan referendum untuk memerdekakan dirinya sendiri. Sedangkan radikalisme di Indonesia juga memiliki keinginan untuk merubah sistem pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan dengan cara menebar teror dan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya untuk masyarakat umum.

2) Maraknya berita hoaks pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Pemilu 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, namun hiruk pikuknya sudah berlangsung jauh sebelumnya. Hal ini ditandai

dengan maraknya kasus hoaks atau berita bohong yang mewarnai dinamika politik Indonesia menjelang Pemilu. Maraknya hoaks tersebut terjadi ketika mudahnya akses teknologi dalam menerima informasi yang berkembang. Namun, sayangnya tidak diiringi dengan logika dalam menangkap informasi yang ternyata tidak benar tersebut. Berdasarkan data Kemenkominfo, terjadi peningkatan hoaks menjelang Pemilu 2019, misalnya pada bulan Februari 2019 ada 300 kasus hoaks, kemudian tanggal 1 sd 20 Maret 2019 terdapat 200 peredaran hoaks. Hoaks yang bertebaran banyak menyorot soal cara-cara yang digunakan kedua calon presiden untuk meraih kemenangan dalam Pemilu 2019. Selain itu, Pemilu 2019 juga menampilkan rivalitas yang keras dan sengit antara kedua kubu. Keduanya sama-sama menggunakan narasi kampanye melalui Medsos untuk saling menjelekan, saling serang bahkan menjatuhkan pihak lawan. Narasi saling menjatuhkan tersebut ternyata makin menegaskan garis polarisasi di tengah masyarakat sehingga masing-masing pendukung mengambil sikap bermusuhan sehingga membahayakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Rasa nasionalisme menjadi pudar karena lebih mengutamakan kelompoknya dari pada kepentingan bangsa dan negara.

3) Subbidang Pengamanan dan Penegakkan Hukum Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Brigadir Jenderal Polisi Darmawan, mengatakan ada 137.829 berita hoaks mengenai Covid-19 selama masa pandemi ini. Dari total berita hoaks itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menyelidiki sebanyak 130.680 kasus. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mencatat sebanyak 104 orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari 66 pria dan 38 perempuan. Dari 104 orang, 17 tersangka ditahan dan 87 orang masih dalam proses. Penyebaran hoax itu membuat masyarakat panik dan tidak saling percaya serta curiga sehingga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat menjadi tidak nyaman dan kondusif.

BAB III PEMBAHASAN

12. **Umum.** Dalam pembahasan terkait pengaruh Medsos pada era globalisasi terhadap nasionalisme dapat dilihat dalam berbagai pembahasan, namun dalam tulisan naskah ini hanya dibatasi pada empat pokok persoalan, khususnya yang terkait dengan pengaruh Medsos pada kehidupan masyarakat pada era globalisasi, kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang di terima, pengaruh Medsos terhadap perilaku masyarakat terkait nasionalisme dan peran Pemerintah dalam mengurangi pengaruh negatif Medsos terhadap nasionalisme.

13. **Pengaruh penggunaan Medsos dalam kehidupan masyarakat pada era globalisasi.** Salah satu dampak dari globalisasi adalah terjadinya perkembangan sosial budaya. Menurut asal katanya globalisasi diambil dari kata global yang berarti dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya kehidupan manusia di berbagai bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Banyak kalangan menyadari bahwa globalisasi selain banyak membawa dampak positif diantaranya transportasi menjadi lebih cepat dan komunikasi menjadi lebih canggih juga banyak membawa dampak negatif.

Perkembangan globalisasi saat ini telah membuat Medsos menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Medsos saat ini sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena dalam aktifitasnya sehari-hari masyarakat selalu menggunakan Medsos. Akses Medsos yang mudah dan hanya perlu menggunakan smartphone saja kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia dengan mengakses berita melalui Medsos. Peran Medsos di era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial kehidupan masyarakat baik secara positif maupun negatif. Akibat dari adanya Medsos ini secara langsung memunculkan perubahan didalam kehidupan masyarakat baik perubahan pada kebudayaan, perubahan pada gaya hidup masyarakat maupun perubahan-perubahan lainnya. Perubahan ini mencakup pada perubahan pada gaya berkomunikasi, penggunaan bahasa, pola interaksi, penampilan dan pola kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Beberapa perubahan akibat pengaruh Medsos dalam kehidupan masyarakat pada era globalisasi antara lain sebagai berikut :

a. **Adanya perubahan dalam gaya berkomunikasi.** Dahulu jika kita ingin berbicara sesuatu atau hanya untuk bercerita dengan teman atau sahabat, kita membutuhkan waktu untuk saling bertemu, namun setelah adanya Medsos masyarakat dapat berkomunikasi antara satu dan lainnya hanya melalui fitur chatting Medsos seperti WhatsApp, Telegram, Line dan lainnya. Banyak masyarakat mengakui bahwa mereka lebih senang berkomunikasi melalui Medsos karena dapat menghemat waktu tanpa harus bertatap muka. Kondisi tersebut diatas secara tidak langsung telah merubah gaya kehidupan masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

b. **Adanya perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat.** Walaupun tetap berbahasa Indonesia dalam kesehariannya, namun tidak dapat dihindari adanya pemakaian bahasa asing dalam menggunakan Medsos. Misalnya mereka mengupload sebuah foto namun menuliskan sebuah deskripsi foto tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris, tidak jarang disaat bergaul masyarakat menggunakan bahasa Inggris. Kita sadari memang bahasa Inggris merupakan bahasa global sehingga membuat masyarakat khususnya remaja merasa dan akan terlihat keren/gaul jika sedang menggunakan bahasa Inggris. Selain itu Medsos juga telah menciptakan bahasa-bahasa yang ganjil yang disebut dengan “ bahasa Alay “, seperti misalnya selamat menjadi “ celamat ”, kata pajak menjadi “ fajak “. Pengguna bahasa Alay memang hanya menggunakan bahasa tersebut pada saat situasi tidak formal, sedangkan pada saat situasi formal pengguna bahasa Alay menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana mestinya. Bahasa terdapat dua macam variasi bahasa yang dibedakan berdasarkan status pemakaiannya. Pertama, yaitu variasi bahasa tinggi dan yang kedua adalah variasi bahasa rendah. Bahasa Alay ini termasuk variasi bahasa yang rendah karena digunakan dalam situasi yang tidak formal seperti banyak digunakan dalam Medsos. Bahasa Alay ini sebenarnya jika dibiarkan terus-menerus maka akan merusak penggunaan bahasa Indonesia yang baku.

c. **Adanya perubahan pola Interaksi dalam kehidupan masyarakat.**

Masyarakat pada umumnya mengakui bahwa salah satu tujuan dari menggunakan internet dan Medsos antara lain untuk membuka wawasan dan memperluas pergaulan serta pertemanan mereka. Mereka mengakui tanpa bertatap muka dan berkenalan secara langsung mereka dapat berteman dengan siapa saja, dari mana saja dan dapat menemui teman-teman baru di akun Medsos mereka. Hal ini mengacu pada penelitian Tira Fitriawardhani yang menyatakan dari 50 narasumber hampir 27 orang tua lebih nyaman menggunakan Medsos sebagai media komunikasi dengan keluarga maupun teman.²⁶ Namun perlu diwaspadai karena di zaman sekarang ini begitu banyak terjadi kejahatan di dunia maya dan sudah banyak yang menjadi korban pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, penipuan dan kejahatan lainnya akibat mengenal orang lain melalui Medsos. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita semua agar lebih waspada untuk jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal di Medsos.

d. **Adanya perubahan berpenampilan / fashion dalam kehidupan masyarakat.** Pengaruh Medsos juga dapat merubah masyarakat dari cara berpenampilannya. Ada sebagian dari masyarakat yang bergaya dengan rambut yang dicat beraneka warna mengikuti kebudayaan barat yang mayoritas orang-orang disana adalah berambut pirang. Bahkan berpakaian minim didepan umum, mengikuti gaya / style dari Korea yang banyak digandrungi oleh para remaja sekarang ini dan mengikuti gaya dari para KPOP idola mereka. Saat ini sudah tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Bahkan saat ini banyak remaja yang mulai malu untuk memakai pakaian budaya kita seperti misalnya batik. Dalam keseharian banyak anak muda yang tidak mau memakai batik hal ini dibuktikan pada penelitian Retno Astuti Handayani yang menyebutkan hanya 46 % anak muda Kabupaten Kudus yang tertarik melestarikan batik tulis Kudus.²⁷ Karena mungkin dianggap tidak modis, padahal batik

²⁶ Tira Fitriawardhani. 2017. Pemanfaatan Sosial Media sebagai Sarana Komunikasi Keluarga Dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang Pada Masyarakat di Surabaya. Cakrawala Jurnal. Vol 11. No 2

²⁷ Retno Astuti Handayani. 2016. Pengaruh Minat Remaja Dalam Pemakaian Batik Terhadap Pelestarian Batik Kudus. Semarang : Universitas Negeri Semarang. hlm 56

merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Akibatnya kebanggaan terhadap produk dan budaya milik sendiri di masyarakat semakin luntur.

e. **Adanya perubahan pola kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.** Dengan perkembangan Medsos sekarang ini masyarakat tidak hanya dapat berkomunikasi namun juga dapat melakukan transaksi jual-beli, sehingga hal ini menimbulkan perubahan di dalam bertransaksi. Dulu orang-orang ingin berbelanja baju ataupun sepatu harus mendatangi toko/butik terlebih dahulu namun sekarang hanya dengan Medsos orang-orang dapat membeli barang. Diakui para remaja bahwa mereka lebih senang berbelanja melalui *online* karna barang-barang yang mereka beli terkadang tidak ada di jual di toko maupun pusat perbelanjaan, padahal dengan berbelanja *online* jika kita tidak teliti kita bisa jadi korban penipuan atau terkadang barang yang dipesan tidak sama dengan barang yang dikirim oleh penjual. Hal lainnya yang timbul akibat adanya internet dan Medsos adalah mencari sebuah informasi dan menemukan informasi dengan mudah tanpa harus membaca buku, koran atau majalah. Bahkan mereka mengakui terkadang jika mendapatkan tugas, mereka dapat menyelesaikannya dengan bantuan Medsos.

Semua perubahan ini akhirnya secara tidak langsung telah mengubah pola kebiasaan para masyarakat sekarang. Ketergantungan terhadap Medsos menjadi sangat tinggi dan membuat kecanduan bagi penggunaannya. Hal ini mengakibatkan para penggunanya jadi apatis dan cuek karena jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Seorang tokoh sosiologi dari Indonesia, yaitu Selo Soemardjan dalam teori "Perubahan sosial" nya menyatakan perubahan sosial mencakup semua aspek perubahan dalam lembaga suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya data hasil penelitian Bangkit Ary Tama pada jurnal Gaster mengenai dampak sosial penggunaan Medsos yang mengakibatkan sebagian besar remaja di SMP Kabupaten Sukoharjo memiliki sikap apatis telah membuktikan dan menguatkan teori diatas. Selain itu data hasil penelitian dari Tira Fitria Wardhani terkait penggunaan Medsos sebagai

sarana komunikasi baru juga menguatkan hal tersebut. Data dari BI juga menunjukkan adanya peningkatan transaksi *online* oleh masyarakat, terutama paska terjadinya pandemi Covid-19. Teori diatas juga sejalan dengan teori perubahan sosial yang disampaikan oleh Moore yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, yaitu pola-pola perilaku dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat terkait pola interaksi sosial dapat bersifat membangun karakter manusia menuju proses yang lebih baik atau malah sebaliknya menjadi lebih buruk. Menghadapi perubahan sosial perlu antisipasi yang kuat dari setiap individu dalam masyarakat sehingga tidak terhanyut pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Individu yang mengembangkan nilai mandiri akan memahami secara arif terhadap perubahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pada pasal 42 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia”. Undang-undang ini memberikan amanah kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib untuk mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra dari berbagai pengaruh, terutama akibat pengaruh Medsos pada era global. Seperti pada kasus penggunaan bahasa Alay dalam Medsos, yang menjadi permasalahannya adalah jika dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi sebuah karakter yang menggunakan bahasa yang tidak baku dan akan berdampak pada berkurangnya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Hal ini yang akan membuat tidak peka dengan kesalahan-kesalahan bahasa yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan akan membuat para pengguna bahasa alay semakin melupakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

Pemerintah dengan segala kewenangan yang dimiliki harus hadir menyelamatkan bahasa dan budaya lokal bangsa agar tidak tergerus oleh hadir Medsos. Dalam segi sosial budaya adanya perubahan sosial budaya pada masyarakat akibat Medsos juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Hal ini sesuai dengan konsep “Keamanan Nasional”, dimana Keamanan Nasional tidak hanya menjadi keamanan negara saja, Keamanan Nasional secara kontemporer mempunyai pengertian yang lebih luas tidak hanya segi ancaman militer saja, tetapi juga ancaman-ancaman non militer. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia disebutkan bahwasanya ancaman non militer berupa ancaman yang menggunakan faktor nir-militer yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi serta keselamatan umum.

Berdasarkan analisa diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab pengaruh Medsos dalam kehidupan masyarakat pada era globalisasi antara lain sebagai berikut :

- 1) **Kurangnya perhatian Pemerintah dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat.** Perkembangan zaman yang akhirnya membawa kita pada zaman serba modern, dampak perubahan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Menurut Azizy, dalam era globalisasi ini berarti terjadi pertemuan dan gesekan nilai nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transportasi dan informasi hasil modernisasi teknologi tersebut. Pertemuan dan gesekan ini akan menghasilkan kompetisi liar yang berarti saling dipengaruhi (dicaplok) dan mempengaruhi (mencaplok), saling bertentangan dan bertabrakan nilai-nilai yang berbeda yang akan menghasilkan kalah atau menang, atau saling kerjasama (*eclectic*).²⁸ Budaya Indonesia yang dulunya ramah-tamah, gotong royong dan sopan berganti dengan budaya barat, misalnya gaya berpakaian, etika kepada orang tua dan bahasa.²⁹ Akibat kurangnya perhatian Pemerintah terhadap budaya lokal

²⁸ Azizy, A. Qodri (2004). Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 20

²⁹ Surahman, S. (2004). Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni dan Budaya Indonesia: Universitas Serang Raya Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

membuat banyak anak muda mulai meninggalkan kebudayaan lokal mereka. Hal tersebut dalam dilihat pada penelitian Gunawan Wibisono mengenai Medsos menunjukkan dari 315 responden pada penelitian ini sebanyak 205 responden (75,9%) merawat budaya atau adat Indonesia dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dan daerah, dan yang terakhir hanya 94 responden (34,8%) membuat konten berupa teks, audio atau audiovisual yang mengkampanyekan Indonesia. Dari penelitian tersebut kita bisa melihat bahwa sebanyak 205 responden yang masih menggunakan bahasa Indonesia dan daerah dengan baik dan benar dan hanya 94 responden yang melakukan kampanye atau membuat konten di Medsos menggunakan bahasa Indonesia.³⁰

Hal ini dapat kita simpulkan bahwa kurangnya perhatian Pemerintah membuat berkurangnya kebudayaan lokal di daerah. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam mengembangkan kebudayaan-kebudayaan lokal bisa di lihat juga pada kasus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) yang masih menjalani proses dalam pengajuan domain internet aksara Jawa yang mengalami kendala syarat administrasi berupa surat pernyataan Pemerintah yang mengakui bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi resmi. *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) sebagai pengelola domain internet dunia mempertanyakan apakah bahasa Jawa digunakan oleh masyarakat Indonesia atau tidak, itu harusnya bisa dibuktikan melalui kebijakan tertulis dari Pemerintah.³¹

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh adalah Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan kerja sama dengan masyarakat (tokoh masyarakat daerah dan *influencer*) untuk mempertahankan

³⁰ Gunawan Wibisono (2017). Media Baru dan Nasionalisme Anak Muda: Pengaruh Penggunaan Medsos 'Good News From Indonesia' terhadap Perilaku Nasionalisme, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 6, No. 2

³¹ Tempo, Domain Internet Aksara Jawa Terkendala Pengakuan Pemerintah, 22 April 2020, <https://tekno.tempo.co/read/1334339/domain-internet-aksara-jawa-terkendala-pengakuan-Pemerintah/full&view=ok>

budaya dan entitas kebudayaan lokal dengan cara lebih modern dan mengajarkan mengenai pembelajaran kebudayaan di sekolah dengan cara lebih bisa diterima siswa, sehingga masyarakat tertarik untuk mengenal, belajar dan melestarikan budaya daerah mereka.

2) **Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan Medsos dan internet.** Data yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahwa pengguna gawai (*gadget*) usia 6 tahun hingga 19 tahun di Indonesia mencapai 65 persen dan 43 persen diantaranya adalah pengguna ponsel cerdas dan internet. Data tersebut menggambarkan bahwa masih banyak pengguna pada tingkat anak SD, remaja yang tidak cerdas atau bijak yang berpotensi menjadi korban dari pengaruh negatif Medsos. Sampai dengan saat ini belum ada aturan di Indonesia yang bisa menghalangi anak menggunakan gawai, terutama ponsel cerdas, maka perlu ada antisipasi untuk mencegah dampak buruknya terhadap anak.³²

Indonesia masih belum memiliki regulasi yang melindungi atau melarang penggunaan gawai terhadap anak-anak seperti Amerika atau Uni Eropa yang memiliki aturan perlindungan akses internet bagi anak-anak. Jika ditelaah dengan teori literasi digital dari Paul Gilster yaitu literasi digital kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Ia mengemukakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karier, dan kehidupan sehari-hari, sehingga dalam prakteknya kemampuan ini bisa di asah dengan cara stimulan secara terus menerus.

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan Medsos dan internet adalah melalui edukasi. Saat ini Pemerintah sudah melakukan

³² Tempo, KPPPA: Anak Harus Paham Dampak Buruk Internet , 5 September 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1244167/kpppa-anak-harus-paham-dampak-buruk-internet>

edukasi dengan cara menggunakan website resmi Pemerintah atau media mainstream untuk menyebarkan informasi dari Pemerintah. Akan tetapi itu dirasa kurang efektif karena Pemerintah kurang melirik Medsos sebagai salah satu sarana interaktif dan edukasi kepada masyarakat sehingga penetrasi Pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan internet dan Medsos bisa lebih efektif jika menggunakan Medsos daripada menggunakan media lainnya.

14. **Kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang diterima melalui Medsos.** Perkembangan zaman yang semakin maju atau yang sering dikenal dengan globalisasi tidak bisa dihindari. Medsos yang menjadi bagian dari perkembangan zaman itu sendiri telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Disadari atau tidak Medsos telah merubah berbagai kehidupan sosial dan budaya masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. Dengan masih banyaknya pengaruh negatif Medsos terhadap masyarakat menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat kita dalam menyaring informasi yang masuk melalui Medsos masih rendah. Kondisi ini relevan dengan adanya data dan fakta yang ditunjukkan oleh *Centre for International Governance Innovation (CIGI) IPSOS* pada tahun 2017 dari sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia, 65%-nya ternyata masih mudah terhasut berita bohong. Mudahnya masyarakat terhasut oleh berita bohong ini juga digambarkan dalam peristiwa kerusuhan di Wamena yang dipicu hoaks tentang guru yang mengucapkan kata-kata rasis. Kondisi diatas didukung juga oleh data *Central Connecticut State Univesity* pada Maret 2016 bertajuk *World's Most Literate Nations Ranked* yang menggambarkan tentang minat membaca masyarakat indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Fenomena ini bisa terjadi karena memang membaca di Indonesia masih belum menjadi kebiasaan. Rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa.

Ali Romdhoni menyatakan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan. Hal ini sejalan dengan Richard Kern yang menjelaskan literasi sebagai kemampuan untuk

membaca dan menulis atau memiliki kesamaan arti dengan belajar dan memahami sumber bacaan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas pada dasarnya dapat dijelaskan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang dilengkapi keterampilan-keterampilan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan. sehingga keterampilan seperti literasi dapat di dapatkan melalui peristiwa sosial di masyarakat maupun melalui pengajaran sehingga tempat belajar tidak selalu identik bangku sekolah atau lembaga pendidikan formal.

Fenomena diatas sangat relevan dengan teori Literasi digital dari Paul Gilster yang mengemukakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks, seperti akademik, karier dan kehidupan sehari-hari.³³ Itulah mengapa kemampuan dalam berpikir kritis sangat diperlukan. Berpikir kritis dan beradaptasi dengan teknologi yang baru adalah tujuan dari adanya literasi digital. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang masuk melalui Medsos tentunya sangat terkait dengan sistem pendidikan yang berlaku secara umum di masyarakat.

Padahal Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab III pasal 4 ayat (5) berbunyi "Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat". Seharusnya bila melihat dan berdasarkan Undang-Undang diatas, pendidikan sesungguhnya diselenggarakan untuk membentuk generasi yang memiliki budaya membaca, menulis dan berhitung. Apalagi pada pasal 5 ayat (1) diamanatkan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Bila amanat konstitusi tersebut dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah dengan dukungan dari masyarakat, maka sebenarnya masyarakat Indonesia sudah tidak ada lagi yang memiliki pendidikan yang rendah. Kualitas dan kuantitas dari sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah akan senantiasa berbanding lurus dengan tingkat kemampuan literasi masyarakat Indonesia secara umum.

³³ Paul Gilster. 1997. Digital Literacy. New York : Wiley.

Berangkat dari pembahasan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang diterima melalui Medsos antara lain sebagai berikut :

a. **Kurangnya kemampuan literasi digital pada masyarakat.** Adanya perubahan aspek sosial pada kehidupan masyarakat akibat pengaruh negatif Medsos bukan hanya dikarenakan faktor eksternal yang berasal dari luar atau lingkungan global tapi juga memiliki faktor penunjang dari masyarakat itu sendiri, yaitu kurangnya kemampuan literasi digital pada masyarakat Indonesia. Globalisasi membuat perputaran informasi menjadi lebih cepat dan tak terkontrol. Pemahaman tentang baca, tulis dan hitung (Calistung) saja tidak cukup untuk diterapkan pada zaman sekarang ini. Secara umum ada enam literasi dasar yang harus dikuasai orang dewasa menurut *World Economic Forum*, yaitu baca tulis, literasi numerasi, literasi finansial, literasi sains, literasi budaya dan kewarganegaraan serta literasi teknologi informasi dan komunikasi atau digital. Itulah yang menjadi dasar adanya literasi digital. Literasi digital adalah daya tangkap dan daya adaptasi kita dengan hal baru. Perbedaan antara literasi digital dan literasi dasar adalah pada kemampuan validasi informasi dan kemampuan berpikir kritis. Dengan masih mudahnya masyarakat kita mempercayai berita bohong (hoaks) mengindikasikan bahwa tingkat literasi digital masyarakat kita masih rendah. Pada hasil survei yang berbeda yang dirilis oleh IGNI menunjukkan bahwa 65% pembaca berita dari internet dan Medsos di Indonesia hanya melihat dari judul berita atau Medsos tersebut sehingga mudah sekali terprovokasi. Ironisnya, meski minat baca buku rendah tapi data *Wearesocial* per Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gawai kurang lebih 9 jam sehari.³⁴

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan kemampuan literasi digital pada masyarakat dengan cara Pemerintah mensosialisasikan pengetahuan tentang literasi digital kepada masyarakat di berbagai sektor terutama pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan

³⁴ We are social Hootsuite, Digital Report 2019, diakses pada 2 Februari 2020, <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>

kebudayaan membuat kebijakan untuk mengajarkan pendidikan literasi digital sejak dini dengan memasukkan materi literasi digital kedalam kurikulum formal pendidikan nasional sehingga cara berpikir kritis dan adaptasi terhadap teknologi baru sudah tertanam pada masyarakat Indonesia sejak dini.

b. **Kurangnya minat baca pada masyarakat.** Meningkatkan minat baca mau tak mau kini sudah sangat diperlukan. Keadaan dunia yang semakin mengglobal secara tidak langsung telah memaksa kita untuk mempertajam pengamatan kita terhadap informasi-informasi yang beredar. Selain itu, keadaan ini juga telah menuntut kita untuk memperbaiki kualitas diri. Salah satu kunci untuk mencapai beberapa poin tersebut adalah dengan membaca. Terkait kurangnya minat baca di masyarakat tidak hanya terjadi pada lingkungan dengan tingkat pendidikan yang rendah, tetapi di lingkungan pendidikan pun peserta didik di Indonesia memiliki tingkat minat baca yang rendah. Padahal, budaya membaca merupakan salah satu ciri peradaban modern.

Akan tetapi, realita di Indonesia minat baca masyarakatnya masih sangat rendah. Minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan hanya 0,001% yang artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Sedangkan negara lain seperti Finlandia menduduki peringkat pertama dengan tingkat literasi yang tinggi hampir mencapai 100%. Peringkat Indonesia ini lebih rendah dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Di Indonesia penduduknya diperkirakan hanya membaca dua sampai tiga buku dalam setahun. Angka tersebut kian timpang saat disandingkan dengan negara maju seperti, Amerika Serikat yang masyarakatnya terbiasa membaca 10-20 buku per tahun dan masyarakat Jepang membaca 10-15 buku setahun. Hal tersebut membuat orang Indonesia tidak dapat memfilter atau bahkan mengikuti perkembangan zaman akibat kurangnya literasi.

Saat ini sistem pendidikan di Indonesia tidak melahirkan generasi yang gemar membaca tetapi hanya melahirkan generasi yang bisa membaca agar disebut sudah belajar. Hal ini tentu hanya mendorong untuk mencapai kelulusan. Padahal manfaat membaca tidak hanya untuk

mencapai kelulusan saja, tetapi untuk kepentingan sepanjang hidup seseorang. Sebab informasi merupakan hal yang penting untuk pengembangan diri. Pada dasarnya Pemerintah sudah mempunyai kebijakan yang diperkuat dalam regulasi dalam bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa kita. Untuk menjadi manusia yang berkualitas tentu saja dengan membudayakan membaca, tanpa membaca mustahil manusia akan memperoleh informasi baru. Untuk memperkuat dan mendukung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam Permendikbud ini terdapat himbauan agar setiap pemangku kepentingan pendidikan ikut serta dalam menjalankan setiap pembiasaan yang terus digemakan oleh Pemerintah yaitu dengan adanya Gerakan Literasi Nasional (GLN). Sejalan dengan konsep literasi menurut Richard Kern yang menjelaskan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis, selain itu literasi juga memiliki kesamaan arti dengan belajar dan memahami sumber bacaan. Dari konsep dan peraturan perundangan tersebut, dengan ditingkatkannya tingkat literasi pada masyarakat maka kemampuan masyarakat untuk selalu belajar dan memahami sumber bacaan semakin besar.

Merujuk dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat dengan cara Pemerintah mendukung program Gerakan Literasi Nasional untuk memberikan buku, selain buku pelajaran kepada sekolah. Saat ini, penggunaan 5% dana bantuan operasional sekolah (BOS) masih berfokus pada pengadaan buku teks pelajaran dan bukan pada buku bacaan yang mampu menumbuhkan minat baca siswa. Pemerintah juga diharapkan memasukkan budaya mencintai buku mulai dari PAUD.

c. **Tradisi kelisanan (*Orality*) yang masih menjamur di masyarakat.** Dalam terminologi studi membaca, masyarakat yang bisa membaca namun memilih untuk tidak membaca tersebut disebut aliterat (sedangkan yang buta huruf disebut illiterat dan yang sudah berbudaya baca masyarakat yang literat). Kondisi masyarakat aliterat tersebut terjadi salah satunya

karena tradisi kelisanan (*orality*) masih merupakan *bottle neck* dalam kantong memori linguistik mereka. Seperti kita tahu secara historis-kultural masyarakat kita mengantongi warisan budaya lisan yang hampir memfosil. Hampir berabad-abad lamanya perilaku komunikasi masyarakat kita lebih banyak berlangsung dalam tataran lisan yang serba melisan (omong-dengar) ketimbang tradisi baca-tulis.

Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang mengalami buta aksara dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan ada 3,4 juta jiwa atau sekitar 2,07% penduduk Indonesia masih mengalami buta aksara. Penduduk yang tak mengenal huruf itu sebagian besar tersebar di 11 provinsi dengan rentang usia 15-59 tahun.³⁵ Angka buta aksara di 23 provinsi lainnya diklaim di bawah angka nasional yaitu 1 %. Menjadikan masyarakat agar melek aksara bukan hal mudah. Faktor dominan yang berkaitan dengan buta aksara adalah masalah pendidikan. Penyandang buta aksara terutama pada usia produktif (25-40 tahun), akan menjadi beban Pemerintah karena keterbatasannya sehingga bukan merupakan aset pembangunan yang produktif.

Menjadikan seseorang agar melek aksara merupakan bagian dari kegiatan pendidikan. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada pasal 13 ayat (1) mengamanatkan bahwa satuan pendidikan ada tiga yakni pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Ketika masyarakat tidak atau belum berkesempatan mengikuti pendidikan formal, maka pendidikan non formal adalah wadahnya. Pendidikan non formal sengaja dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, sehingga pendidikan non formal ditujukan untuk pembentukan keterampilan dan pengetahuan di luar pendidikan formal. Secara eksplisit kemampuan yang akan diraih dalam pendidikan non formal yakni kemampuan berkomunikasi, kemampuan produktif dan kemampuan memperbaiki diri dalam kehidupan masyarakat. Pemberantasan buta aksara sebagai salah satu bentuk pendidikan non formal untuk memberikan kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi dan perbaikan kualitas diri. Secara

³⁵ Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018

kelompok pendidikan non formal merupakan pengembangan masyarakat dalam bentuk pendidikan.

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh untuk mengurangi tingkat buta aksara di Indonesia dengan cara Pemerintah mendukung dan meningkatkan program-program non-formal dan formal terkait pengentasan buta aksara nasional dengan memprioritaskan kepada provinsi yang memiliki tingkat buta aksara tertinggi, seperti program SUKMA (Surat Keterangan Kemampuan Membaca) untuk memberikan semangat juga bukti kemampuan hasil belajar bagi masyarakat buta aksara dan program kejar paket A (setara dengan SD), paket B (setara dengan SMP) dan paket C (setara dengan SMA) bagi masyarakat pra buta aksara untuk mengejar kesetaraan dengan masyarakat yang mengikuti pendidikan formal.

d. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam mendukung ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan terkait literasi di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mendekatkan buku dengan masyarakat. Ada ungkapan bijak mengatakan setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, setiap buku adalah ilmu. Boleh berhenti sekolah tapi jangan berhenti belajar. Ungkapan itu mengisyaratkan belajar merupakan sebuah proses yang harus terus menerus dilakukan di manapun dan kapanpun. Tempat belajar tidak selalu identik dengan sekolah atau lembaga pendidikan formal. Belajar bisa dilakukan di sebuah tempat bernama perpustakaan. Perpustakaan, buku dan akses internet merupakan sarana dan prasarana pendidikan terkait literasi. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando menyampaikan jumlah perpustakaan di Indonesia ada 164.610 buah. Indonesia menempati posisi kedua yang memiliki perpustakaan terbanyak di bawah India dengan 323.605 perpustakaan. Sementara data Kemendikbud RI memperlihatkan lebih dari 6000 perpustakaan berbasis masyarakat (taman bacaan) tersebar di seluruh Propinsi. Informasi tersebut memperjelas bahwa ternyata ada banyak ruang bisa diakses masyarakat dalam rangka aktivitas literasi. Bukan cuma enam literasi dasar saja, tetapi juga aktivitas literasi berbasis pengetahuan lainnya. Sebagai ruang literasi,

perpustakaan tentu sering dikunjungi banyak orang dari berbagai lapisan. Masyarakat datang ke perpustakaan dengan tujuan berbeda-beda. Ada yang membaca, mencari informasi, belajar, diskusi atau mengakses internet.

Menurut data dari Perpustakaan Nasional tahun 2017 ada sekitar 74 persen perpustakaan dengan status sangat baik di pulau Jawa, tetapi 26 persen lainnya yang berada di luar pulau Jawa dalam kondisi di bawah akreditasi C.³⁶ Begitu pula halnya dengan buku dimana jumlah buku baru yang diterbitkan di negeri ini hanya 0,0009 persen dari total penduduknya. Artinya, sembilan judul buku baru untuk setiap sejuta penduduk. Padahal menurut standar UNESCO, seharusnya di negara berkembang sebanyak 10 persen atau 55 per satu juta penduduk dan di negara-negara maju di atas 30 persen atau 513 judul buku baru setahun untuk setiap sejuta penduduknya.³⁷ Hal ini membuat kesenjangan antara sarana dan prasaran terkait literasi di pusat dan di daerah.

Berlandaskan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pada pasal 11 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi”. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 2 menyebutkan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Boleh dikatakan perpustakaan memberi keleluasaan akses ruang bagi terciptanya proses pembelajaran mandiri lintas batas usia.

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan sarana dan prasana terkait literasi di Indonesia dengan cara Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan terutama di daerah terpencil, terluar dan terisolir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat juga memperbanyak jumlah perpustakaan keliling (*mobile*) yang lebih bersifat

³⁶ Data Perpustakaan Nasional Indonesia Tahun 2017

³⁷ Daniel Dhakidae dan Tim, 2002, Indonesia Dalam Krisis 1997-2002, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. hlm 187

fleksibel, sehingga perpustakaan tidak lagi harus didatangi namun juga bisa mendatangi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memanfaatkan fasilitas di Koramil dan Polsek untuk mendukung sarana dan prasarana terkait literasi di daerah.

15. **Pengaruh penggunaan Medsos terhadap perilaku masyarakat terkait nasionalisme.** Nasionalisme adalah suatu paham atau suatu ideologi yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap anggota bangsa merupakan bagian dari suatu bangsa yang besar. Tiap anggota bangsa berkewajiban mencintai dan membela negaranya atau dengan kata lain nasionalisme adalah rasa ingin mempertahankan negaranya dari ancaman baik yang datang dari internal maupun eksternal. Nasionalisme juga merupakan jiwa dan semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsanya agar tidak terjajah baik secara politik, ekonomi, budaya maupun militer.

Saat ini pengaruh negatif dari Medsos telah berdampak pada tumbuhnya perilaku masyarakat yang mencerminkan memudarnya sikap nasionalisme. Warga masyarakat yang seharusnya mencintai negaranya dengan senantiasa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa namun kenyataannya justru saling bertikai antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena Medsos digunakan oleh banyak kalangan justru untuk menebar kebencian, memecah belah persatuan, hujatan, hasutan, informasi hoaks dan bahkan untuk mengembangkan ide-ide separatis dan khilafah serta paham radikal. Perilaku masyarakat di Medsos tidak lagi mencerminkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang dikenal rukun, santun dan ramah. Nilai-nilai ke-Indonesian telah memudar bahkan sirna seiring cepatnya perkembangan teknologi informasi. Beberapa pengaruh Medsos terhadap perilaku masyarakat terkait nasionalisme. antara lain sebagai berikut :

a. **Perilaku masyarakat yang mudah dipecah belah sehingga memudarkan pesatuan dan kesatuan.** Kondisi tersebut ditunjukkan adanya fakta pertikaian antar warga desa di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Jawa Barat Pada tanggal 10 Januari 2017 karena terprovokasi kabar bohong (hoaks) di Medsos. Kejadian ini menggambarkan bagaimana mudahnya masyarakat kita untuk percaya terhadap berita yang belum tentu

dijamin kebenarannya, kemudian mengumpulkan massa dengan membawa senjata tajam untuk menyerang warga lainnya.

b. **Perilaku masyarakat yang mendukung separatisme.** Pada hari Selasa 4 September 2018 di halaman depan kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) telah ditangkap sebanyak 34 orang mahasiswa USTJ oleh aparat kepolisian karena diduga terlibat gerakan separatisme Papua Merdeka. Penangkapan tersebut ada kaitannya dengan aksi gerakan Papua Merdeka karena menyebarkan selebaran kegiatan United Liberation Movement For West Papua (ULMFWP) kepada masyarakat dengan menggunakan Medsos. Isi selebaran itu menyerukan agar pelajar dan pegawai serta masyarakat meliburkan diri dan ikut berkumpul untuk aksi damai menyerukan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Akhirnya membuat beberapa anak muda di Papua mendukung gerakan tersebut akibat hasutan atau berita yang mereka sebar

c. **Perilaku masyarakat yang mendukung radikalisme dan terorisme.** Banyak konten di Medsos yang berupa suara, gambar atau video yang bermuatan radikalisme dan terorisme dapat digambarkan data dari Kemenkominfo dimana selama tahun 2018 sudah melakukan pemblokiran konten yang mengandung unsur paham radikal dan terorisme sebanyak 10.499 konten di berbagai aplikasi Medsos. Berbagai aplikasi Medsos tersebut telah disusupi dan dicemari konten-konten yang menyebarkan paham radikal dan terorisme yang menasar kepada seluruh lapisan masyarakat baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Anggi mantan TKW yang pernah bekerja di Hongkong merupakan narapidana teroris yang pernah merencanakan pengeboman di Jakarta dan Bandung. Anggi bukan termasuk orang yang agamis dan tidak pernah mengikuti pengajian di taman Victoria Hongkong yang menjadi tempat berkumpulnya para TKW. Sejak Desember 2016 Anggi mulai terpapar radikalisme melalui Medsos. Dia bergabung di 60 channel Telegram dan sekitar 30 chat room. Sekitar Maret 2017 ia mengunggah video di Facebook dimana berbaiat kepada pimpinan ISIS, Abu Bakar Al Baghdadi. Setelah ketahuan ia

dideportasi Pemerintah Hongkong dan akhirnya ditangkap Densus 88 pada Agustus 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa bela negara adalah merupakan hak dan sekaligus kewajiban seluruh warga negara. Kalau kita berpijak dari kejadian tersebut, tindakan yang dilakukan masyarakat desa sama sekali tidak mencerminkan upaya bela negara yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Bela negara yang seharusnya mengangkat senjata untuk mengusir penjajah atau musuh namun yang terjadi justru sebaliknya, mengangkat senjata untuk menyakiti dan menganiaya sesama anak bangsa. Pada era saat ini upaya bela negara tidak harus mengangkat senjata, menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak mudah diadu domba dan dipecah belah juga merupakan upaya bela negara. Identitas bangsa Indonesia yang selama ini kita banggakan bahwa kita ini bangsa yang rukun, sopan dan ramah tiba-tiba hilang dan pudar dalam seketika seiring pudarnya rasa dan jiwa nasionalisme kita.

Pengaruh Medsos terhadap perilaku masyarakat terkait nasionalisme juga dapat dilihat pada banyaknya konten bermuatan radikal di Medsos. Paham radikal yang disebarkan melalui Medsos tersebut lebih kepada pandangan yang sempit dan fanatik terhadap agama dan adanya keinginan untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Masyarakat atau warga negara yang seharusnya mencintai negara dengan tetap mempertahankan ideologi Pancasila justru malah ingin mengganti dengan ideologi lainnya. Paham radikal dan terorisme tentunya sangat berkaitan erat karena biasanya terorisme diawali dengan sebuah paham radikal terlebih dahulu. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas

internasional.³⁸ Berkembangnya paham radikal dan terorisme di masyarakat akibat pengaruh negatif Medsos menunjukkan telah pudarnya nasionalisme sebagian masyarakat kita. Seharusnya masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dan membangun suasana damai tapi malah menebarkan suasana teror dan rasa takut. Kondisi diatas tidak sesuai atau relevan dengan UUD 1945 pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”,

Berkembangnya paham radikal dan terorisme akibat pengaruh negatif dari Medsos pada era globalisasi akan membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan negara dan merupakan ancaman bagi negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.”

Sedangkan menurut John M. Collins terdapat tiga pertimbangan yang berpengaruh dalam mengevaluasi ancaman, yaitu : pertama, dengan cara menilai kemampuan (*capabilities*), kedua, intensitasnya (*intension*) dan ketiga, kemudahan untuk dapat diserang (*vulnerabilities*). Jadi secara umum terminologi ancaman dapat dimaknai sebagai preskripsi-indentifikatif bahwa setiap bentuk, perilaku, usaha ataupun kegiatan yang membahayakan kedaulatan, persatuan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. Dari teori Collins tersebut bisa kita lihat bahwa penyebaran paham radikal dan terorisme melalui Medsos tersebut sudah masuk dalam katagori ancaman.

³⁸. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang pasal 1 ayat(2)

Merujuk pada analisa diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya tumbuhnya perilaku masyarakat yang mencerminkan memudarnya sikap nasionalisme akibat pengaruh Medsos, yaitu :

1) **Penggunaan Medsos yang tidak bertanggung jawab.**

Menurut Oxford Internet Institute (2019) pada media MSNBC "*How Russian trolls weaponized sosial media*" Bharath Ganesh dan Mimie Liotsiou mengungkapkan bahwa sejak dari 2012 sampai sekarang, kita telah melihat bots, Algoritma dan bentuk lain dari otomatis digunakan oleh aktor politik di berbagai dunia untuk memanipulasi opini publik lewat platform sosial media besar seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube. Manipulasi atau penggiringan opini publik ini dilakukan oleh Pemerintah, oposisi atau pihak lain untuk mendukung atau mengikuti kepentingan mereka.³⁹

Kenapa hal ini menjadi berbahaya dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia sampai Januari 2019 diperkirakan sekitar 268,2 juta jiwa, dan pengguna internet di Indonesia berjumlah 150 juta jiwa dari 268,2 juta jiwa penduduk Indonesia. Pengguna Medsos aktif sekitar 150 juta dan pengguna Medsos lewat telepon genggam sekitar 130 juta orang. Rata-rata penggunaan internet di Indonesia tiap harinya selama 8 jam 36 menit dengan berbagai peralatan. Sedangkan rata-rata penggunaan Medsos (Medsos) oleh mereka sekitar 2 jam 26 menit.⁴⁰ Maka tak heran bila saat ini nilai-nilai dan norma-norma sosial mulai terkikis akibat banyak orang lebih memilih bersosialisasi melalui Medsos. Terdapat Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, sebagai pedoman kepolisian dalam penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*. Akan

³⁹ MSNBC, "How Russian trolls weaponized sosial media", diakses 20 Juni 2020 dalam <https://www.msnbc.com/on-assignment/watch/how-russian-trolls-weaponized-social-media-1496728643983>

⁴⁰ We are social Hootsuite, Digital Report 2019, diakses pada 2 Februari 2020, <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>

tetapi ranah menangani hoaks tidak hanya dilakukan oleh aparat Pemerintah, masyarakat juga dibutuhkan untuk melawan hoaks yang beredar juga melakukan kontra narasi pada hoaks tersebut.

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh Pemerintah adalah dengan meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan Pemerintah untuk melakukan pendidikan literasi digital, sehingga mewujudkan kesadaran masyarakat yang bijak dalam menggunakan Medsos.

2) **Adanya pengaruh global yang membawa pemahaman-pemahaman baru terkait ideologi di Medsos.** Menurut Samuel P Huntington dalam bukunya *Clash of Civilization* dan *the remaking of world order* menjabarkan bahwa pada masa sekarang akan banyak sekali berpecahan atau konflik diakibatkan tidak adanya batasan antar masyarakat dan ada 2 subjek yang menjadi sumber konflik yaitu budaya dan religi.⁴¹ Kedua hal ini lah yang menjadi salah satu sumber utama dalam penyebaran radikalisme dan separatisme di seluruh dunia. Saat ini salah satu cara untuk menyebarkan paham radikalisme dengan menggunakan Medsos. Hal dapat dilihat dari penelitian Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyatakan Facebook masih menjadi media yang potensial untuk menyebarkan radikalisme. Temuan itu didapatkan setelah mereka mengadakan riset dalam rentang waktu September-November 2017. Contoh nyata pengaruh penyebaran radikalisme di Medsos bisa dilihat pada 2016 lalu, pelaku teror di Cikokol Banten membuka situs-situs radikal sebelum melancarkan aksi teror. Dikatakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius bahwa pelaku teror tersebut belajar membuat bom melalui media internet.⁴²

⁴¹ Samuel Huntington. 1996. *Clash of Civilization*. United States : Simon & Schuster

⁴² medcom.id, Kepala BNPT: Radikalis Muda Banyak Belajar dari Internet, 22 Oktober 2016, <https://m.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/9K57W9Rb-kepala-bnpt-radikalis-muda-banyak-belajar-dari-internet>

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh dengan aktualisasi melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pada tataran pendidikan formal perlu revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah yang sudah di sesuaikan dengan perkembangan global. Sehingga masyarakat tertarik untuk belajar mengenai ideologi dari bangsanya sendiri.

3) **Adanya perilaku masyarakat yang mendukung ideologi selain pancasila.** Salah satu ideologi yang gencar digaungkan di masyarakat adalah ideologi khilafah. Khilafah secara bahasa dapat diartikan sebagai penguasa atau pemimpin, dapat juga diartikan sebagai pengganti. Arti khilafah didefinisikan sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinya disebut khalifah. Organisasi yang mendukung ideologi ini di Indonesia adalah Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI sendiri saat ini telah dibubarkan oleh Pemerintah karena ideologi khilafah yang diusungnya dinilai bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi masih adanya gerakan-gerakan eks HTI yang menyebarkan paham tersebut di masyarakat.

Berikutnya bisa dilihat pada survei Alvara Research Center yang menemukan ada sebagian milenial atau generasi kelahiran akhir 1980-an dan awal 1990-an yang setuju pada konsep khilafah sebagai bentuk negara. Survei dilakukan terhadap 4.200 milenial yang terdiri dari 1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar SMA di Indonesia. Mayoritas milenial memang memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara. Namun ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal sebuah negara. Alvara juga melakukan survei terhadap kalangan profesional yang melibatkan 1.200 responden. Di kalangan profesional, yang setuju ideologi Islam sebagai ideologi Indonesia sekitar 15,5 persen.

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh dengan penggunaan beragam pendekatan dalam merevitaliasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar dapat berkembang mengikuti perkembangan global dan agar identitas bangsa Indonesia tidak luntur dengan gempuran budaya dan nilai-nilai asing akibat pengaruh Medsos. Contoh menggunakan Medsos sebagai cara untuk mengajarkan dan mempromosikan nilai-nilai di masyarakat Indonesia.

16. **Peran Pemerintah dalam mengurangi pengaruh negatif penggunaan Medsos terhadap nasionalisme.** Pemerintah memang tidak membatasi hak berekspresi masyarakat dalam menggunakan Medsos, namun Pemerintah memiliki kewenangan dan wajib membuat kebijakan, regulasi maupun program kegiatan dalam rangka mengantisipasi berbagai pengaruh negatif Medsos dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan merugikan. Sementara itu, pertumbuhan akses terhadap konten negatif juga tidak lepas dari semakin mudah dan terjangkaunya akses internet dan pengguna yang bertambah dari tahun ke tahun. Melihat tingkat literasi media di Indonesia yang tidak begitu tinggi serta terjangkaunya harga paket data, Indonesia cukup rentan terpapar informasi bermuatan negatif di Medsos. Oleh karena itu tidak heran jika Pemerintah melakukan usaha preventif dengan memblokir situs-situs yang dinilai mengandung konten negatif. Dengan kewenangan yang dimiliki, Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap konten informasi yang bersifat mencemarkan nama baik, memecah belah persatuan, pornografi, kebohongan yang merugikan publik, paham radikal dan terorisme yang dapat melunturkan jiwa nasionalisme masyarakat.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 melalui Kemenkominfo membuat kanal khusus bagi aduan masyarakat yang menerima informasi elektronik yang patut diduga diragukan kebenarannya. Kanal atau saluran khusus ini digunakan untuk menampung berbagai macam persoalan terkait indikasi hoaks yang beredar di masyarakat. Diharapkan dengan saluran khusus ini dapat menekan berkembangnya berita hoaks yang membuat situasi menjadi tidak pasti dan simpang siur yang dapat menyebabkan keresahan di masyarakat. Disini perlu

kehadiran Pemerintah untuk segera memverifikasi informasi yang berkembang dimasyarakat tersebut merupakan berita hoaks atau bukan. Selain itu ada juga program yang bernama SiBerkreasi yang merupakan gerakan nasional untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu penyebaran konten negatif melalui internet seperti *hoaks*, *cyberbullying* dan *Online radicalism*. Berbagai kebijakan dan pembuatan regulasi serta program implementasinya sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah, namun pada kenyataannya *output* yang diharapkan belum dapat diwujudkan secara optimal karena adanya beberapa kendala dan kelemahan yang ada di berbagai sektor. Salah satu contohnya kelemahannya adalah dalam menangani situs yang bermuatan pornografi, SARA, Narkoba, penipuan, perjudian dan kegiatan ilegal lainnya, dimana mekanisme pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenkominfo masih menggunakan tingkatan nama domain belum sampai pada URL (*content by content*) sehingga hanya konten dengan situs berbasis domain saja yang dapat dilakukan pemblokiran.

Bila kita melihat data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 2019 menemukan hampir 200 hoaks berhubungan dengan kesehatan setiap harinya dan harus menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan untuk masuk dalam kategori hoaks atau penipuan kesehatan. Memang dalam penanganan tentang hoaks, Kemenkominfo memiliki keterbatasan kewenangan karena sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif pada pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa jenis situs internet yang bermuatan negatif yang ditangani adalah pornografi dan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selain pornografi Kemenkominfo tidak bisa bertindak secara langsung, harus berkoordinasi atau mendapatkan pengaduan/laporan dari Kementerian dan Lembaga Negara terkait terlebih dahulu. Permasalahan yang sering terjadi adalah banyaknya laporan hoaks yang dilaporkan ke Kemenkominfo justru datangnya dari masyarakat bukan dari Kementerian terkait. Karena bukan menjadi bidangnya maka Kemenkominfo tidak bisa menindaklanjuti secara langsung dan harus menunggu laporan dari Kementerian terkait. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang

baik antara Kemenkominfo dengan Kementerian/Lembaga negara terkait yang didukung oleh peran serta aktif dari masyarakat agar penanganan pengaruh negatif Medsos dapat dilaksanakan secara lebih baik.

Sedangkan pada kasus kebocoran 1 juta data pengguna Facebook Indonesia pada tahun 2018, Pemerintah hanya bisa melakukan sanksi administratif dan peringatan kepada Facebook mengenai hal tersebut. Selanjutnya menyerahkan kepada Facebook Indonesia untuk melakukan audit internal.⁴³ Melindungi dari segala penyalahgunaan informasi dan elektronika apalagi terkait dengan sebuah data pribadi masyarakat Indonesia adalah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 40 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah dalam memberikan perlindungan belum maksimal dikarenakan Indonesia sampai dengan saat ini tidak memiliki peraturan perlindungan data pribadi.

Selain itu survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada bulan April-Juli tahun 2019 menemukan penyebaran konten radikalisme di Medsos sangat masif. Konten-konten itu didominasi oleh empat jenis konten keagamaan dengan Indeks diseminasi Medsos atau penyebaran konten yang memicu radikalisme secara nasional berada pada skor 38,33 (skala 0-100). Sedangkan pada Indeks kontra radikal secara nasional hanya ada di angka 11,68 dan perilaku kontra narasi dengan penyebarluasan pesan-pesan perdamaian melalui media elektronik juga hanya di angka 5,85. Indeks untuk penyebaran konten yang memicu radikalisme secara nasional masuk dalam katagori tinggi sedangkan indeks untuk melakukan kontra radikal dan kontra narasi justru masuk dalam kategori sangat rendah. Bila kita melihat data ini dapat di gambarkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian terkait serta masyarakat dalam melakukan upaya membendung

⁴³ Tirto.id, Kebocoran Data: Perlukah Pemerintah Memberi Sanksi Facebook?, <https://tirto.id/kebocoran-data-perlukah-Pemerintah-memberi-sanksi-facebook-cHme>

pengaruh negatif Medsos masih belum maksimal. Oleh karena itu perlu pengembangan konsep *Penta Helix* dalam program mengurangi pengaruh negatif Medsos yang dilakukan Pemerintah dalam mengembangkan sinergi antar instansi terkait dengan menggandeng atau kerjasama dengan melibatkan akademisi, swasta, masyarakat dan media guna mendukung seoptimal mungkin dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Berkembangnya hoaks dan paham radikal serta terorisme apabila tidak diatasi dengan baik akan dapat mengakibatkan perpecahan, ketidakpastian dan suasana rasa takut secara meluas karena selama ini terorisme selalu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melaksanakan aksinya. Kondisi ini sudah menjadi katagori ancaman bagi negara dan bangsa sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa "Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan."

Berdasarkan analisa diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab peran Pemerintah dalam mengurangi pengaruh negatif Medsos terhadap nasionalisme masih belum optimal antara lain sebagai berikut :

- a. **Tumpang tindih aturan dan kewenangan antar Kementerian dan Lembaga.** Untuk memerangi pengaruh negatif Medsos, Pemerintah membutuhkan kerja sama antar Kementerian dan Lembaga terkait lainnya. Saat ini Kementerian yang bertanggung jawab terkait Medsos adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kewenangan yang dimiliki oleh Kemenkominfo saat ini tentunya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada. Namun bila kita melihat dari pembahasan yang disampaikan diatas maka kerjasama antar Kementerian dan lembaga serta masyarakat menjadi kata kunci dalam upaya mengurangi pengaruh negatif Medsos pada masyarakat. Koordinasi dan kerjasama memang mudah diucapkan namun tidak mudah untuk dapat dilaksanakan karena membutuhkan kemauan dan keinginan yang kuat

antar instansi. Dalam tataran konsep terkait kerjasama antar lembaga Pemerintah maupun swasta sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemenkominfo sudah banyak melakukan kerjasama atau membuat MoU dengan berbagai instansi terkait lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional dan badan-badan lainnya termasuk dengan penyedia layanan seperti Facebook, Whatsapp dan lain sebagainya. Sesungguhnya saat ini yang menjadi permasalahannya lebih kepada tataran implementasinya. Masih terdengar mengemuka justru adanya ego sektoral dan lambatnya respon positif yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Memang dalam sebuah kerjasama dibutuhkan sebuah komitmen dan konsistensi yang kuat di masing-masing lembaga terkait. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua terutama para pimpinan yang ada di tiap-tiap Kementerian atau lembaga yang terkait termasuk pihak swasta (penyedia layanan) maupun masyarakat. Contoh dari kurangnya kerja sama antar Kementerian dan lembaga di Pemerintahan atau swasta dapat dilihat pada penanganan kasus Papua. Pada kasus Papua, Veronica Koman masih bisa melakukan cuitan atau tweet mengenai kasus tersebut di internet padahal yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).⁴⁴ Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya titik temu aturan antara Pemerintah dan penyedia layanan (dalam hal ini twitter) terkait *hate speech* dan *hate spin*.

Indonesia sejak 19 Mei 2017 telah memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melindungi semua masyarakat Indonesia dari bahaya siber. Akan tetapi, tidak ada aturan yang memberikan kewenangan BSSN untuk menangani Medsos secara langsung. Hingga sampai saat ini untuk penanganan Medsos masih dalam kendali Kemenkominfo. Hal ini sangat berpengaruh pada rantai birokrasi yang lama ketika akan melakukan pemblokiran dan penanganan situs. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomasi No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan "Kegiatan ilegal lainnya

⁴⁴ Tirto.id, Tweet Veronica Koman Usai Jadi Tersangka Kasus Rasialisme Papua, <https://tirto.id/tweet-veronica-koman-usai-jadi-tersangka-kasus-rasialisme-papua-ehyX> Tweet Veronica Koman Usai Jadi Tersangka Kasus Rasialisme Papua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi antara Kemenkominfo dan lembaga negara terkait untuk melakukan pemblokiran suatu situs atau konten Medsos yang berbahaya. Kondisi ini yang menyebabkan eksekusi pemblokiran menjadi lama sehingga diperlukan penyerdahaan mekanismenya agar lebih efektif dan efisien.

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh dengan cara membuat MoU kerja sama antar Kementerian, Lembaga dan Swasta dalam penanganan pengaruh media sosial sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kelambatan dalam penanganan pengaruh negatif media sosial, seperti membuat BSSN sebagai lembaga negara yang mengatur mengenai dunia siber dari serangan siber hingga Medsos dan membuat Satgas mengenai Medsos. Dengan adanya Satgas Medsos yang dikepalai oleh BSSN dengan anggota Lembaga dan Kementerian terkait, maka ketika terjadi pelanggaran (yang ditemukan oleh Kemenkominfo) tim Satgas dapat langsung menentukan bahwa hal tersebut hoaks atau tidak tanpa menunggu birokrasi yang berbelit belit.

b. **Belum adanya peraturan hukum yang kuat untuk mengatasi pelanggaran dan pengaruh negatif akibat Medsos.** Sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai perangkat hukum untuk mengatur dan memberi sanksi pada provider atau penyedia layanan Medsos. Kita hanya memiliki Permen No 19 tahun 2014 yang hanya menjelaskan mengenai sanksi administratif bagi penyedia layanan yang tidak menuruti aturan Pemerintah. Seperti pada kasus kebocoran 1 juta data pengguna Facebook Indonesia pada tahun 2018, Pemerintah hanya bisa melakukan sanksi administratif dan peringatan kepada Facebook mengenai hal tersebut. Selanjutnya menyerahkan kepada Facebook Indonesia untuk melakukan audit internal.⁴⁵ Selain hal tersebut Indonesia juga tidak memiliki peraturan

⁴⁵ Tirto.id, Kebocoran Data: Perlukah Pemerintah Memberi Sanksi Facebook?, <https://tirto.id/kebocoran-data-perlukah-Pemerintah-memberi-sanksi-facebook-cHme>

perlindungan data pribadi. Sejak 2016, Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pembahasan RUU yang diusulkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih belum selesai hingga hari ini. Di sisi lain aturan mengenai perlindungan data pribadi bukannya tidak ada di Indonesia. Studi yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada 2016 menunjukkan ada 30 Undang-Undang berbeda yang memuat ketentuan mengenai perlindungan pribadi di Indonesia. Regulasi yang sudah ada ini bersifat sektoral dan mengatur ranah atau sektornya sendiri-sendiri, seperti kesehatan, administrasi penduduk, Perbankan atau jasa keuangan dan lainnya. Semuanya memiliki dasar masing-masing sehingga tidak mengacu pada standar perlindungan data pribadi yang sama. Karena itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi penting keberadaannya sebagai payung hukum Pemerintah dalam memberikan perlindungan secara maksimal.

Saat ini Indonesia tidak memiliki UU Perlindungan Data Pribadi di dunia maya. Kita tertinggal jauh dibandingkan negara Malaysia yang telah mempunyai UU Perlindungan Data Pribadi sejak 2010. Singapura dan Filipina memilikinya sejak 2012 sedangkan Thailand baru tahun 2020 ini mengumumkan berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah seharusnya dapat melindungi masyarakat dari segala ancaman sesuai dengan konsep Keamanan Nasional dimana aman dan damai dari segala ancaman militer maupun non militer. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi di sini adalah melindungi dari segala ancaman militer maupun non militer. Dari hal tersebut bisa kita pahami bahwasanya melindungi data pribadi merupakan tindakan melindungi tumpah darah Indonesia dari segala ancaman.

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh Pemerintah adalah membuat peraturan yang bersifat spesifik terkait Medsos, persebaran informasi, mengatur pengguna Medsos maupun penyedia layanan Medsos dan memberikan proteksi mengenai perlindungan data pribadi dari masyarakat agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maupun penyedia

layanan atau provider itu sendiri. Tujuannya agar memiliki ketetapan hukum yang jelas dan mengikat bagi pengguna maupun penyedia layanan Medsos. Di sini peran Kemenkominfo, BSSN dan DPR RI sangat diperlukan aktif agar peraturan mengenai perlindungan data pribadi ini bisa disahkan. Pemerintah bisa melakukan *benchmarking* pada Uni Eropa dengan peraturan *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang sukses melindungi masyarakat Uni Eropa.

c. **Program Pemerintah yang masih bersifat monoton di era globalisasi.** Pada era globalisasi saat ini melakukan inovasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua orang atau organisasi tidak terkecuali Pemerintah agar dapat melakukan pembaharuan di berbagai sumber daya sehingga menyesuaikan dengan perubahan yang ada dan program-program yang telah dilakukan dapat memiliki manfaat lebih baik lagi. Proses inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan sains karena kedua hal ini dapat membuatnya lebih mudah untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Pada dasarnya manfaat dari inovasi adalah untuk meningkatkan atau meningkatkan fungsi dari penggunaan suatu produk atau sumber daya sehingga orang lain mendapatkan lebih banyak manfaat. Pemerintah diwajibkan untuk mengikuti perubahan pada perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan tujuan agar dapat selalu melindungi, mengawasi dan mengedukasi masyarakatnya dari berbagai pengaruh negatif Medsos.

Berbagai kebijakan dan program yang dibuat dan dilaksanakan dalam rangka mengurangi pengaruh negatif Medsos seperti pembuatan kanal khusus, SiberKreasi maupun berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh Kemenkominfo dihadapkan dengan tujuan, sasaran dan hasil yang diharapkan sepertinya belum optimal. Hal ini di indikasikan dengan masih banyaknya hoaks dan penggunaan Medsos untuk menyebarkan paham radikal dan terorisme yang masih banyak, walaupun secara umum bila dilihat dari aspek jumlah sudah ada penurunan dibandingkan jumlah awalnya.

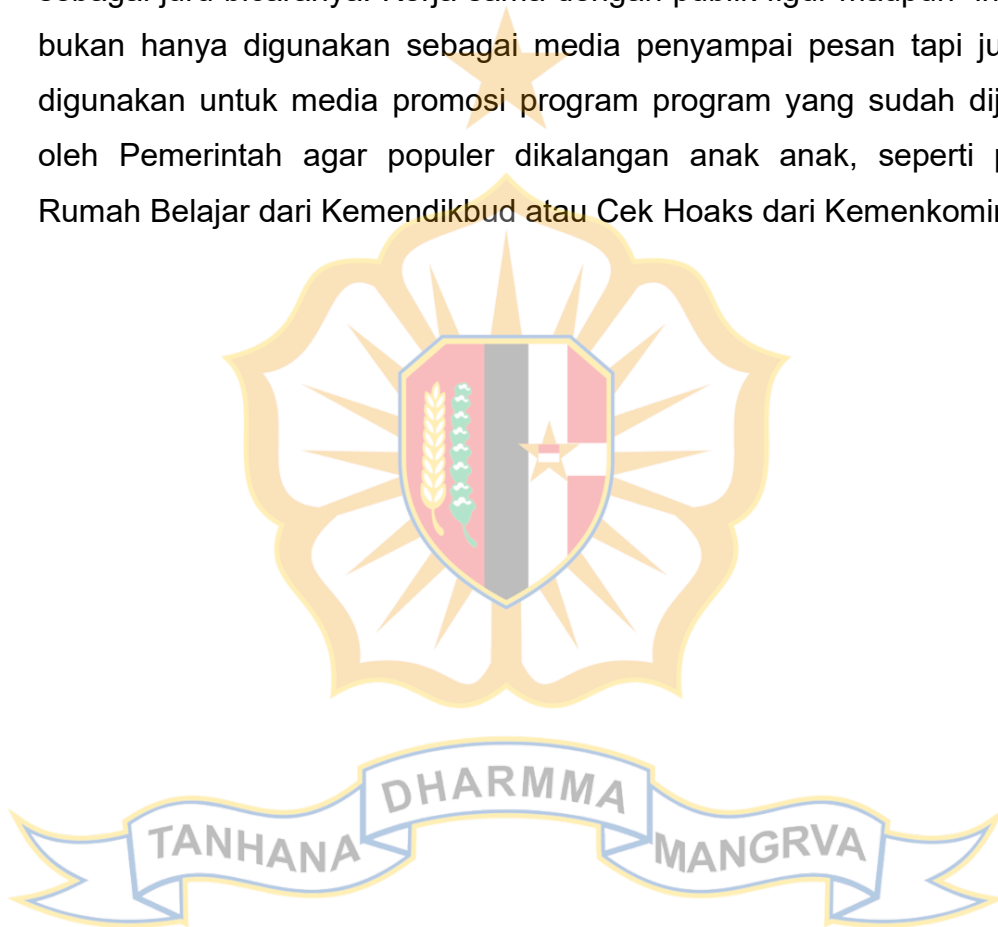
Berbicara tentang inovasi kita bisa melihat pengalaman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menggunakan Medsos

Twitter sebagai media pemberitahuan kepada masyarakat dan sarana pemberantasan hoaks pada saat terjadinya bencana pada tahun 2010 lalu. Program tersebut di inisiasi oleh Almarhum Bapak Sutopo Nugroho yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Pusat Data, Informasi dan Humas yang memanfaatkan Medsos sebagai sarana melawan berita hoaks yang pada saat itu bermunculan lewat SMS atau lini Medsos lainnya yang membuat keresahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang tertimpa bencana. Selain menggunakan Medsos, Sutopo juga menggunakan media mainstream seperti Radio dan TV untuk selalu mengabarkan kondisi terkini terkait bencana dengan rentang waktu tertentu. Selain itu kita juga bisa membandingkan platform atau program yang dibuat antara Pemerintah dengan swasta yang pada kenyataannya program yang dari swasta yang lebih laku atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti contoh yang terjadi pada laporan cek hoaks pada website Kemenkominfo lebih sedikit dikunjungi oleh masyarakat dibandingkan dengan cek hoaks pada media swasta seperti Tempo.co maupun Liputan6.com. Padahal pada cek hoaks swasta, lembaga swasta juga melakukan validasi pada Kemenkominfo sebagai wakil Pemerintah selaku pemilik otoritas.

Pada kasus BNPB pemberitahuan informasi secara berkala yang dilakukan BNPB tersebut merupakan praktek dari teori *one gate system* dari Yono Reksoprodjo. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwasanya pemilik otoritas melakukan pemberitahuan atau pengumuman secara langsung dengan rentang waktu tertentu, sehingga berita hoaks yang beredar hanya dipercaya di rentang waktu sebelum informasi dari pemilik otoritas diumumkan. Hoaks sendiri ada dikarenakan adanya kekosongan informasi di masyarakat. Dengan adanya informasi yang berkala tersebut masyarakat akan lebih percaya terhadap pemberitaan dari otoritas yang berwenang daripada pemberitaan hoaks, teori tersebut terbukti sukses pada kasus bencana Gunung Merapi di Jogja tahun 2010 lalu.

Berangkat dari analisa terhadap permasalahan yang ada, maka solusi atau upaya yang harus ditempuh Pemerintah adalah selalu berinovasi terkait platform atau program yang dibuat terutama yang terkait dengan

upaya mengurangi pengaruh negatif Medsos terhadap masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Lebih terbuka dan tidak enggan untuk mengikuti program milik Kementerian lain atau swasta bila terbukti lebih baik dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan, seperti menggandeng publik figur yang menarik atau *influencer* sebagai juru bicara dalam menyampaikan berita terupdate terkait hoaks dan konten negatif lainnya, seperti saat ini Satuan Gugus Tugas Covid 19 menggunakan dokter Reisa Broto Asmoro sebagai juru bicaranya. Kerja sama dengan publik figur maupun *influencer* bukan hanya digunakan sebagai media penyampai pesan tapi juga bisa digunakan untuk media promosi program program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah agar populer dikalangan anak anak, seperti program Rumah Belajar dari Kemendikbud atau Cek Hoaks dari Kemenkominfo.



BAB IV PENUTUP

17. **Simpulan.** Dari pembahasan Taskap dengan judul Pengaruh Media Sosial Pada Era Globalisasi Terhadap Nasionalisme dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pengaruh penggunaan Medsos dalam kehidupan masyarakat pada era globalisasi telah menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik secara budaya, etika dan norma yang berlaku. Medsos juga telah mendorong berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat antara lain mencakup pada perubahan gaya dan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, pola interaksi, penampilan dan pola kebiasaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perubahan tersebut antara lain disebabkan karena kurang perhatiannya Pemerintah dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan Medsos dan internet. Oleh karena itu Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan kerja sama dengan masyarakat (tokoh masyarakat dan *influencer*) untuk mempertahankan budaya dan entitas kebudayaan lokal dengan cara lebih modern dan mengajarkan mengenai pembelajaran kebudayaan di sekolah dengan cara lebih bisa diterima siswa. Selain itu Pemerintah juga perlu memanfaatkan Medsos sebagai salah satu sarana interaktif dan edukasi kepada masyarakat sehingga penetrasi Pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan internet dan Medsos bisa lebih efektif daripada menggunakan media mainstream lainnya.

b. Kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang diterima melalui Medsos masih rendah, sehingga mengakibatkan masyarakat masih mudah untuk mempercayai berita bohong/hoaks, mudah terprovokasi/terhasut dan kemudian melakukan tindakan yang melawan hukum seperti melakukan mobilisasi massa untuk melakukan pengusakan dan pembakaran. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang diterima disebabkan antara lain karena kurangnya kemampuan literasi digital masyarakat, minat baca masyarakat yang masih rendah, tradisi kelisanan yang masih subur dalam masyarakat

dan kurangnya perhatiannya Pemerintah dalam mendukung ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan terkait literasi di daerah. Oleh karena itu Pemerintah perlu mensosialisasikan pengetahuan tentang literasi digital kepada masyarakat di berbagai sektor terutama pendidikan. Pemerintah juga harus lebih fokus memberikan buku selain buku pelajaran ke sekolah dengan melakukan penguatan program Gerakan Literasi Nasional agar minat baca masyarakat menjadi meningkat. Sedangkan untuk mengurangi tingkat buta aksara di Indonesia dengan cara Pemerintah mendukung dan meningkatkan program-program non-formal dan formal terkait pengentasan buta aksara nasional dengan memprioritaskan kepada provinsi yang memiliki tingkat buta aksara tertinggi. Selain itu Pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan terutama di daerah terpencil, terluar dan terisolir, memperbanyak jumlah perpustakaan keliling (*mobile*) serta Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memanfaatkan fasilitas di Koramil dan Polsek untuk mendukung sarana dan prasarana terkait literasi di daerah.

c. Pengaruh negatif dari penggunaan Medsos telah berdampak pada tumbuhnya perilaku masyarakat yang mencerminkan memudarnya sikap nasionalisme. Warga masyarakat yang seharusnya mencintai negaranya dengan senantiasa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa namun kenyataannya justru saling bertikai antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena Medsos digunakan oleh banyak kalangan justru untuk menebar kebencian, memecah belah persatuan, hujatan, hasutan, informasi hoaks dan bahkan untuk mengembangkan ide-ide separatis dan khilafah serta paham radikal. Perilaku masyarakat di Medsos tidak lagi mencerminkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang dikenal rukun, santun dan ramah. Nilai-nilai ke-Indonesian telah memudar bahkan sirna seiring cepatnya perkembangan teknologi informasi. Tumbuhnya perilaku masyarakat yang mencerminkan memudarnya sikap nasionalisme akibat pengaruh Medsos terjadi dikarenakan Penggunaan Medsos yang tidak bertanggung jawab, adanya pengaruh global yang membawa pemahaman-pemahaman baru terkait ideologi dan karena adanya perilaku masyarakat yang mendukung ideologi selain Pancasila. Oleh karena itu Pemerintah

meningkatkan kerja sama dengan akademisi, swasta, masyarakat dan media guna mewujudkan kesadaran masyarakat agar bijak dalam menggunakan Medsos. Selain itu perlu juga dilakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat baik melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal.

d. Peran Pemerintah dalam mengurangi pengaruh negatif penggunaan Medsos terhadap nasionalisme masih belum optimal. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan merugikan. Dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap konten informasi yang bersifat negatif dan dapat melunturkan jiwa nasionalisme masyarakat. Peran Pemerintah dalam mengurangi pengaruh negatif Medsos terhadap nasionalisme masih belum optimal dikarenakan masih adanya aturan yang tumpang tindih, belum adanya peraturan yang kuat dan program pemerintah yang masih monoton. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara Kementerian dan lembaga, dan swasta dalam menangani pengaruh negatif Medsos di masyarakat, membuat peraturan hukum yang lebih komprehensif sehingga bisa menjadi payung hukum yang kuat dalam melakukan penegakkan hukum dan Pemerintah selalu melakukan inovasi terkait platform dan program yang dibuat agar lebih efektif dan efisien.

18. **Rekomendasi.** Berdasarkan pembahasan di atas guna mengurangi pengaruh negatif Medsos yang dapat memudarkan jiwa nasionalisme masyarakat, maka disarankan sebagai berikut:

a. Kepada Kemendikbud dan Kemenhan dan Kementerian terkait lainnya dalam mengkampanyekan nasionalisme di masyarakat juga menggunakan Medsos sebagai sarana edukasinya. Kementerian terkait perlu bekerja sama dengan masyarakat dengan lebih mengedepankan tokoh masyarakat dan Influencer (Youtuber, Selebgram, Blogger) yang memiliki followers/pengikut yang banyak dengan membuat video-video narasi berdurasi pendek yang dapat menggugah dan mengobarkan nasionalisme masyarakat dari berbagai kalangan dari anak-anak sampai dengan orang tua.

- b. Dalam penanganan Hoaks dan konten-konten negatif disarankan kepada Pemerintah pusat agar memberikan penguatan baik berupa anggaran maupun regulasi terhadap program SiberKreasi yang ada di Kemenkominfo dengan melibatkan perwakilan-perwakilan dari Kementerian atau lembaga negara terkait dan media mainstream yang ada sehingga sistem *One Gate System* dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
- c. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih memfokuskan dalam mendukung program program peningkatan literasi, seperti memasukkan budaya mencintai buku dari PAUD dan pengentasan buta aksara juga menunjang sarana dan prasana terkait literasi di Indonesia khususnya di daerah atau wilayah yang memiliki indeks literasi dan literasi digitalnya rendah dengan pendekatan skala prioritas .
- d. Kementerian Hukum dan HAM beserta DPR bersama-sama membuat aturan yang lebih jelas terkait kewenangan antar lembaga, menginisiasi penerbitan regulasi-regulasi perlindungan masyarakat seperti perlindungan data pribadi dan perlindungan siber masuk menjadi program Legislasi Nasional (Prolegnas).



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azizy, A. Qodri. 2004. *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bahan Ajar Lemhannas Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Cetakan Tahun 2020. Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
- Daniel Dhakidae dan Tim. 2002. *Indonesia Dalam Krisis 1997-2002*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Gilster, Paul. 1997. *Digital Literacy*. New York : Wiley.
- Hutington, Samuel. 1996. *Clash of Civilization*. United States : Simon & Schuster
- Jabrohim. 2004. *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Masyarakat UAD.
- Literasi Digital (Gerakan Literasi Nasional). 2017. Jakarta: Sekretariat TIM GLN Kemdikbud
- Silalahi, T. B.,. 2010. *Kepemimpinan Visioner Dalam Rangka Reformasi Birokrasi*. Materi Ceramah Kepemimpinan, Jakarta : Lemhannas RI

Jurnal :

- Bangkit Ary Pratama dan Defie Septiana Sari. 2020. *Dampak Sosial Intensitas Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Berupa Sikap Apatist Di SMP Kabupaten Sukoharjo*. GASTER Vol. 18 No. 1. ISSN 1858-3385
- Gunawan Wibisono. 2017. *Media Baru dan Nasionalisme Anak Muda: Pengaruh Penggunaan Medsos 'Good News From Indonesia' terhadap Perilaku Nasionalisme*. Jurnal Studi Pemuda. Vol. 6. No. 2
- Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein. 2010. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Sosial media*. Business Horizons 53(1)
- Kerangka Literasi Digital. 2018. Jakarta: Kemenkominfo Publisher. ISBN 9786025132421.
- Retno Astuti Handayani. 2016. *Pengaruh Minat Remaja Dalam Pemakaian Batik Terhadap Pelestarian Batik Kudus*. Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Surahman, S. 2004. *Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni dan Budaya Indonesia*. Universitas Serang Raya Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Tira Fitriawardhani. 2017. Pemanfaatan Sosial Media sebagai Sarana Komunikasi Keluarga Dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang Pada Masyarakat di Surabaya. Cakrawala Jurnal. Vol 11. No 2

Internet :

KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dunia Maya, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dunia%20maya> diakses pada 12 Februari 2020

KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Internet, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet> diakses pada 12 Februari 2020

KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Literasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi> diakses pada 12 Februari 2020

KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pengaruh, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemerintah> diakses pada 12 Februari 2020

KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pengaruh, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh> diakses pada 12 Februari 2020

Kemenkominfo, ISIS Sebar Paham Radikal Melalui Media Digital, https://Kemenkominfo.go.id/content/detail/4523/isis-sebar-paham-radikal-melalui-media-digital/0/sorotan_media diakses pada tanggal 29 Maret 2020

Kemenkominfo, Teknologi Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos, 10 Oktober 2019, https://www.Kemenkominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-Medsos/0/sorotan_media

Kontan, BI catat jumlah transaksi e-commerce selama wabah corona tumbuh signifikan, 30 April 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-catat-jumlah-transaksi-e-commerce-selama-wabah-corona-tumbuh-signifikan>

MSNBC, "How Russian trolls weaponized sosial media", diakses 16 November 2019 dalam <https://www.msnbc.com/on-assignment/watch/how-russian-trolls-weaponized-social-media-1496728643983>

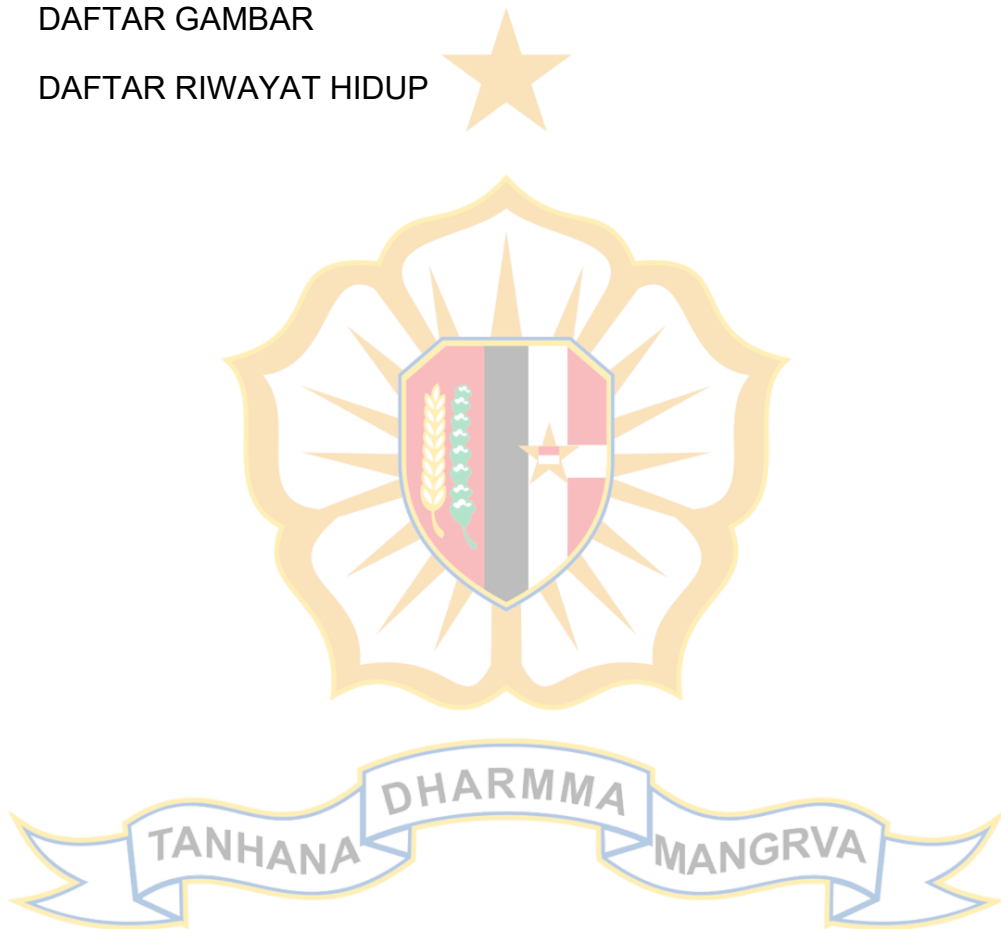
medcom.id, Kepala BNPT: Radikalis Muda Banyak Belajar dari Internet, 22 Oktober 2016, <https://m.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/9K57W9Rb-kepala-bnpt-radikalis-muda-banyak-belajar-dari-internet>

Merdeka.com, Kelompok teoritis memanfaatkan media sosial sebarakan radikalisme, 16 Mei 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kelompok-teroris-manfaatkan-media-sosial-sebarakan-radikalisme.html> diakses pada 20 Juni 2020

- Nina Minawati Muhaemin, "Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan". <https://www.slideshare.net/Muhaemin93/pengertian-Pemerintah-dan-Pemerintahan> Diunduh pada tanggal, 29 Maret 2020
- Republika, Radikalisme di Medsos, BNPT Petakan 4 Konten Keagamaan, 11 Desember 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/q2b4os428/radikalisme-di-medsos-bnpt-petakan-4-konten-keagamaan>, diakses pada 20 Juni 2020
- Tempo, Domain Internet Aksara Jawa Terkendala Pengakuan Pemerintah, 22 April 2020, <https://tekno.tempo.co/read/1334339/domain-internet-aksara-jawa-terkendala-pengakuan-Pemerintah/full&view=ok>
- Tempo, KPPPA: Anak Harus Paham Dampak Buruk Internet , 5 September 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1244167/kpppa-anak-harus-paham-dampak-buruk-internet>
- Tempo.co, Terprovokasi Kabar Hoax, Warga 3 Desa Serang Desa Curug, 10 Januari 2017, <https://nasional.tempo.co/read/834604/terprovokasi-kabar-hoax-warga-3-desa-serang-desa-curug/full&view=ok>, diakses pada 20 Juni 2020 x
- Tirto.id, Tweet Veronica Koman Usai Jadi Tersangka Kasus Rasialisme Papua, <https://tirto.id/tweet-veronica-koman-usai-jadi-tersangka-kasus-rasialisme-papua-ehyXTweet>
- Tirto.id, Kebocoran Data: Perlukah Pemerintah Memberi Sanksi Facebook?, <https://tirto.id/kebocoran-data-perlukah-Pemerintah-memberi-sanksi-facebook-cHme>
- Tribun.com, Ada Gerakan Separatis di Medsos, Fadli Zon Tegur Jokowi: TNI Polri Jangan Dipakai Alat Politik, 9 September 2018, <https://wow.tribunnews.com/2018/09/09/ada-gerakan-separatis-di-medsos-fadli-zon-tegur-jokowi-tni-polri-jangan-dipakai-alat-politik>, diakses pada 20 Juni 2020
- We are social Hootsuite, Digital Report 2019, diakses pada 2 Februari 2020, <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>

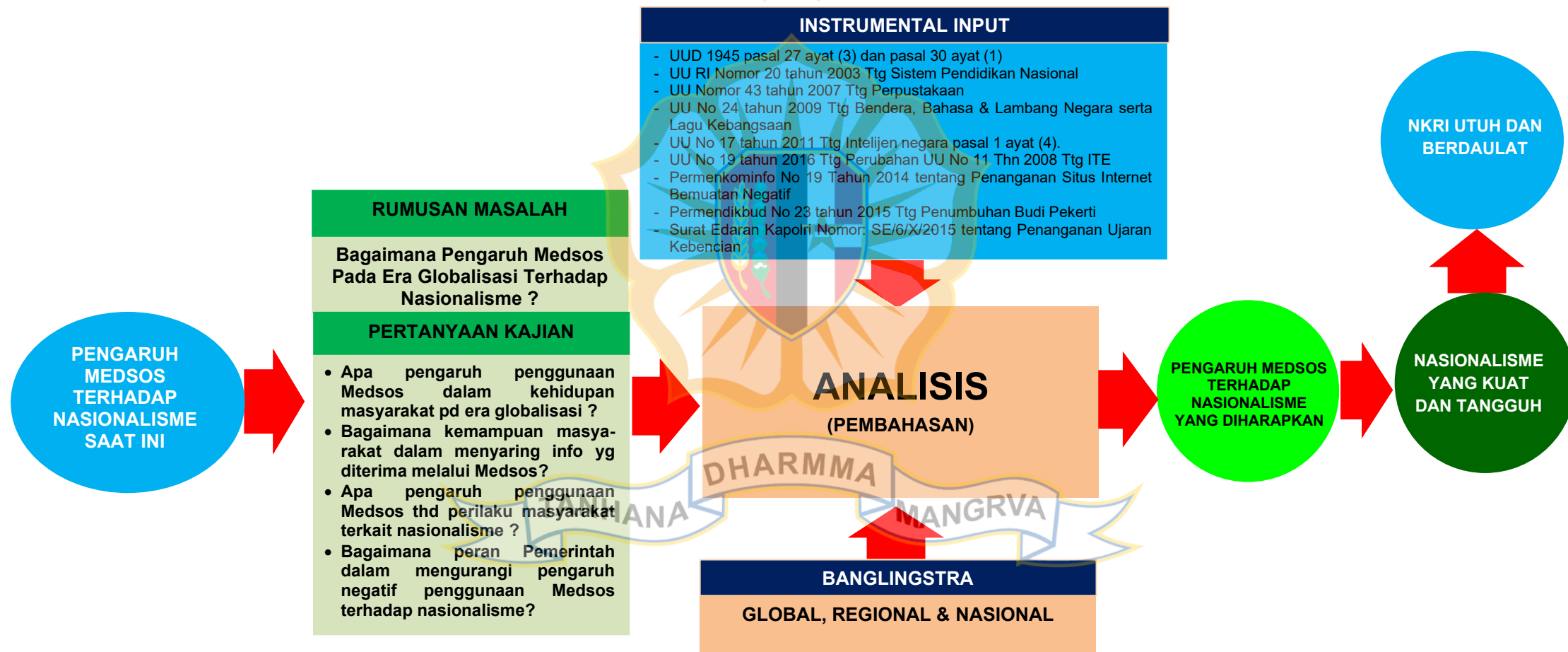
DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ALUR PIKIR

PENGARUH MEDIA SOSIAL PADA ERA GLOBALISASI TERHADAP NASIONALISME

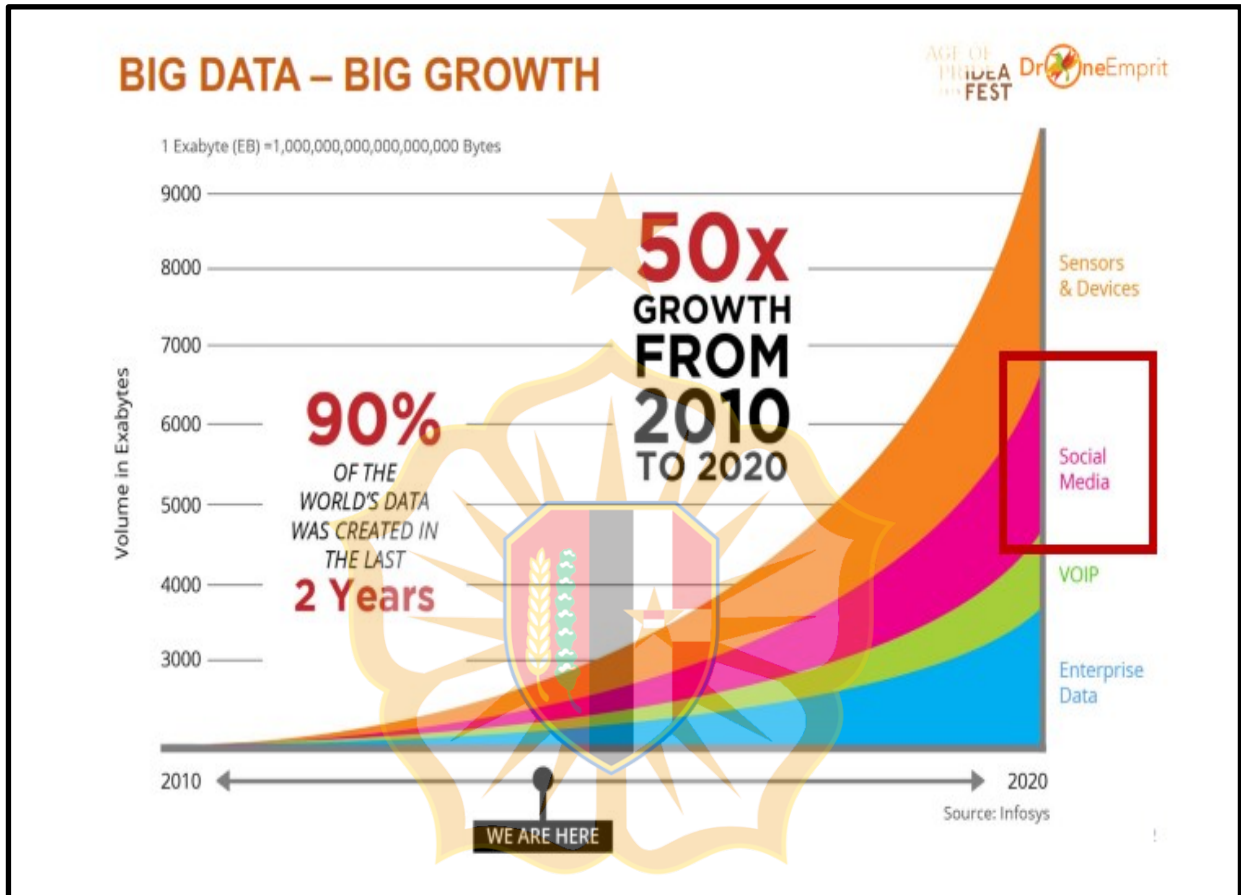


TABEL

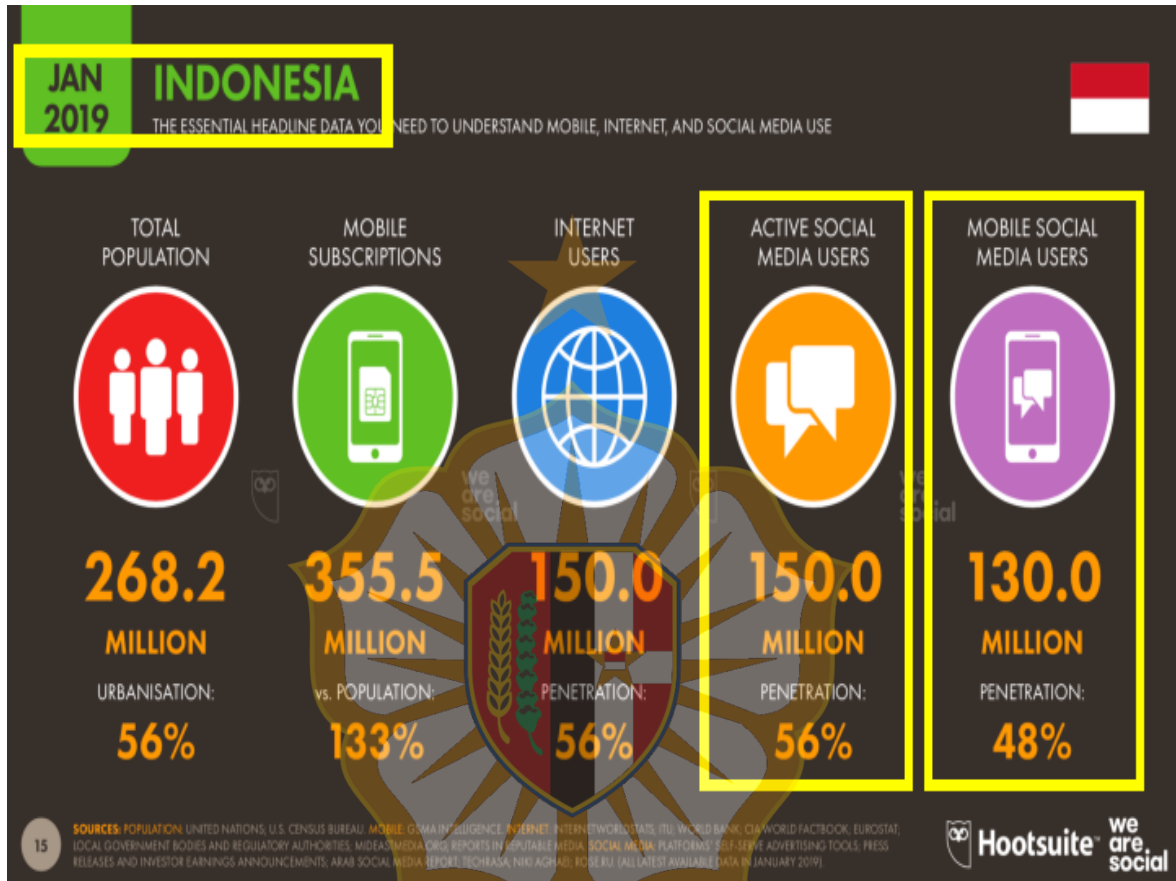
1. TABEL 2.1 (GRAFIK PENINGKATAN PENGGUNA MEDSOS DI DUNIA)
2. TABEL 2.2 (JUMLAH PENGGUNA MEDSOS DI INDONESIA)
3. TABEL 2.3 (MEDIA SOSIAL YANG SERING DIGUNAKAN DI INDONESIA)
4. TABEL 2.4 (UMUR PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA)



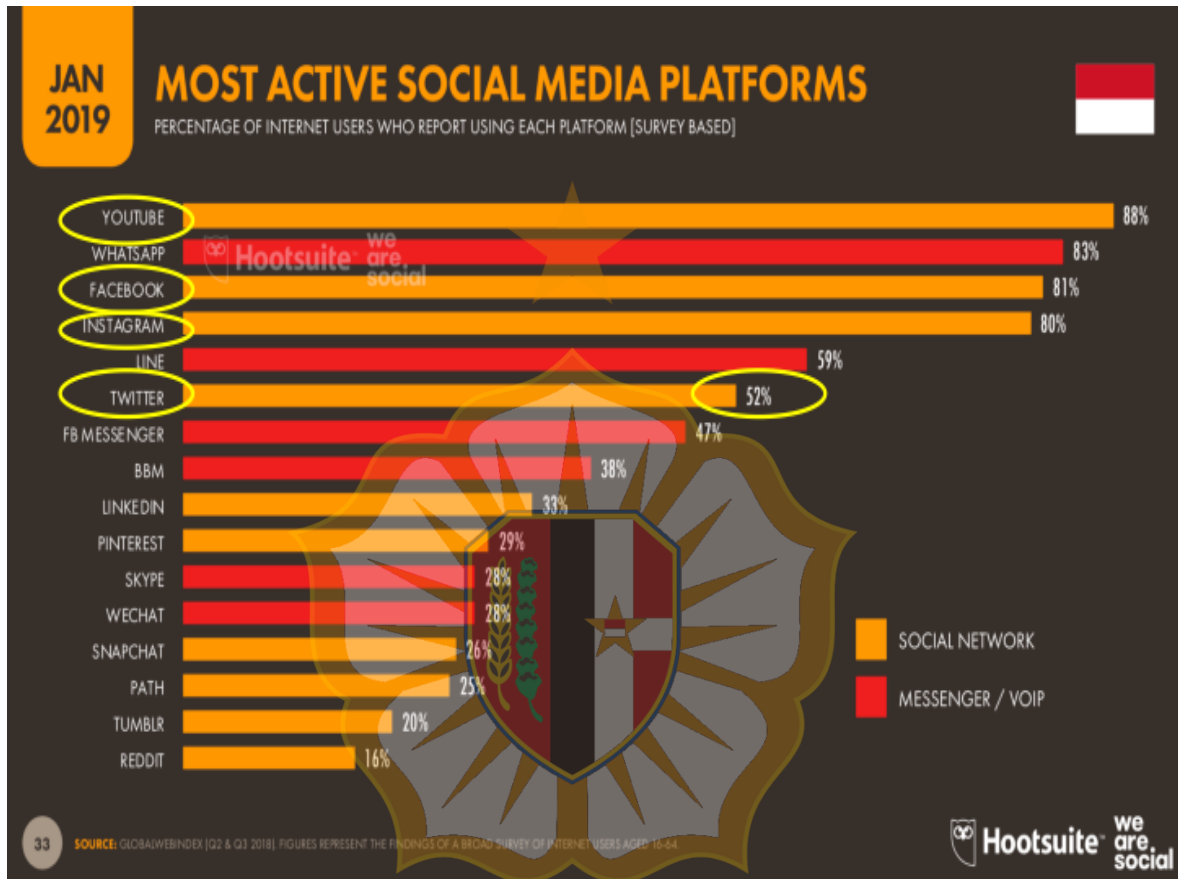
GRAFIK PENINGKATAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI DUNIA



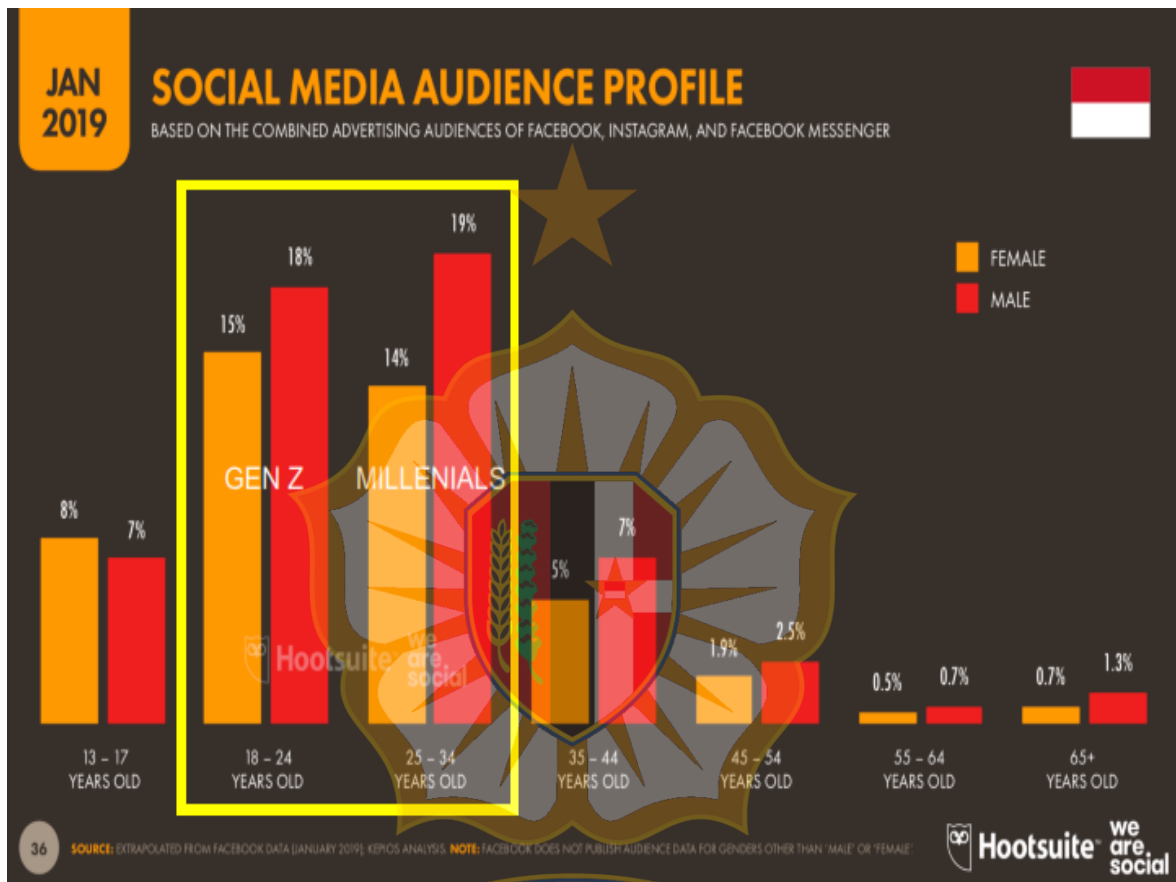
JUMLAH PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA



MEDIA SOSIAL YANG SERING DIGUNAKAN DI INDONESIA

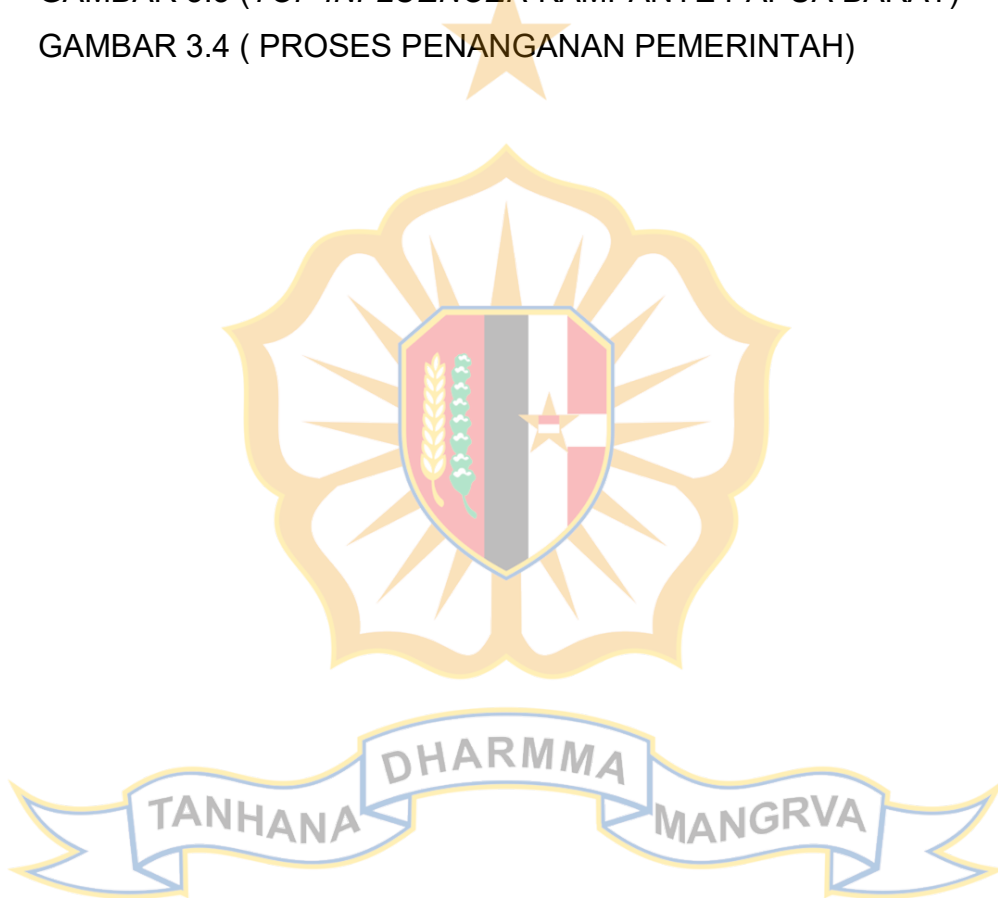


UMUR PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

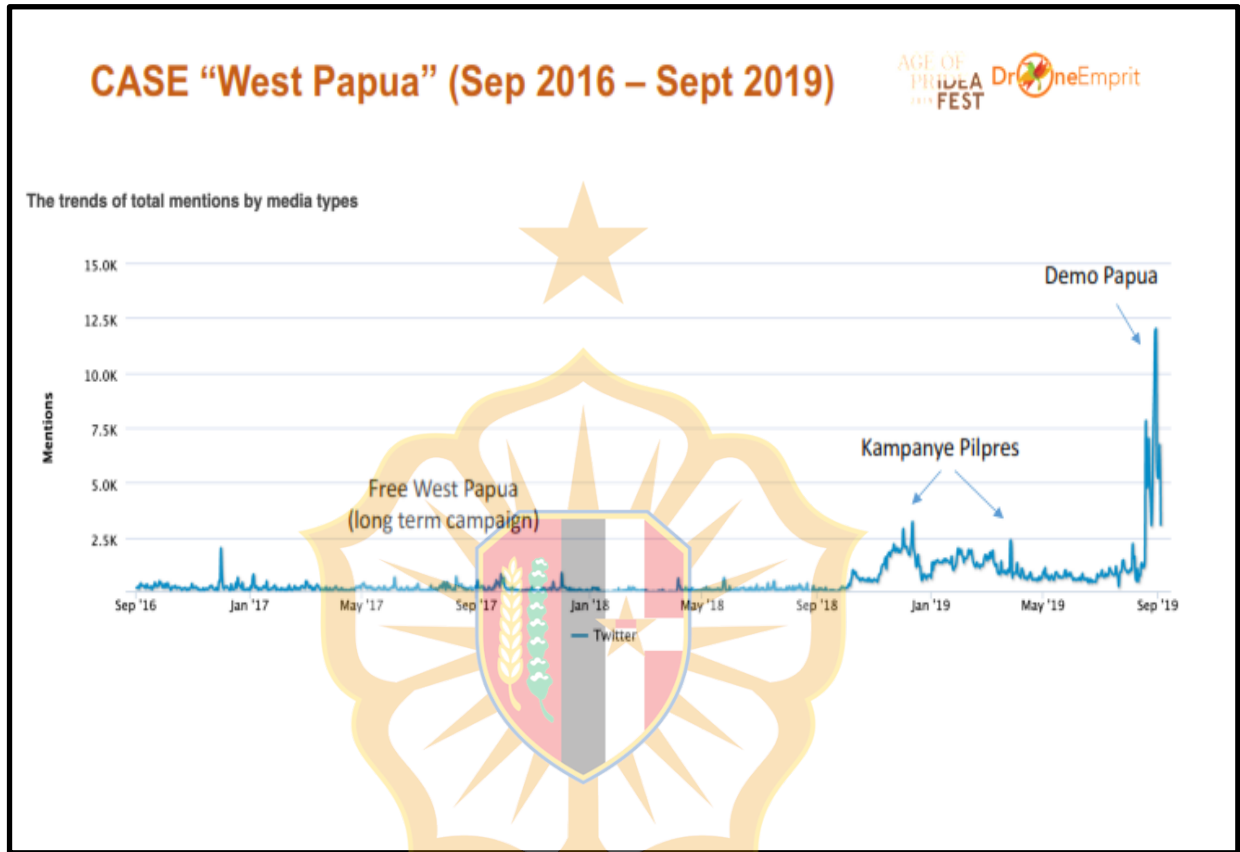


DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR 3.1 (GRAFIK CUITAN KAMPANYE PAPUA BARAT)
2. GAMBAR 3.2 (CONTOH CUITAN KAMPANYE PAPUA BARAT)
3. GAMBAR 3.3 (*TOP INFLUENCER* KAMPANYE PAPUA BARAT)
4. GAMBAR 3.4 (PROSES PENANGANAN PEMERINTAH)



GRAFIK CUITAN KAMPANYE DI PAPUA BARAT



CONTOH CUITAN KAMPANYE DI PAPUA BARAT

2 Top Twit "West Papua" (2-4 Sept)

Benjamin Strick
@BenDotBrown

I captured five days of tweets using #WestPapua & #FreeWestPapua tags after a crackdown by Indonesian forces against Papuans in Aug. What I found was a bot network spreading pro-govt propaganda.

Follow this thread for an #OSINT journey with a @Twitter network analysis



9:44 PM - Sep 3, 2019 - Twitter Web App

454 Retweets 711 Likes

Veronica Koman
@VeronicaKoman

30/8/19 Jayapura, West Papua

8 orang Papua ditarik dari dalam mobil oleh milisi sipil, ditikam, dipanah, dan hampir dibunuh.

Civil militia broke a car and forced 8 West Papuans inside it to get out; then slashed, stabbed, and almost killed them. One in critical condition.



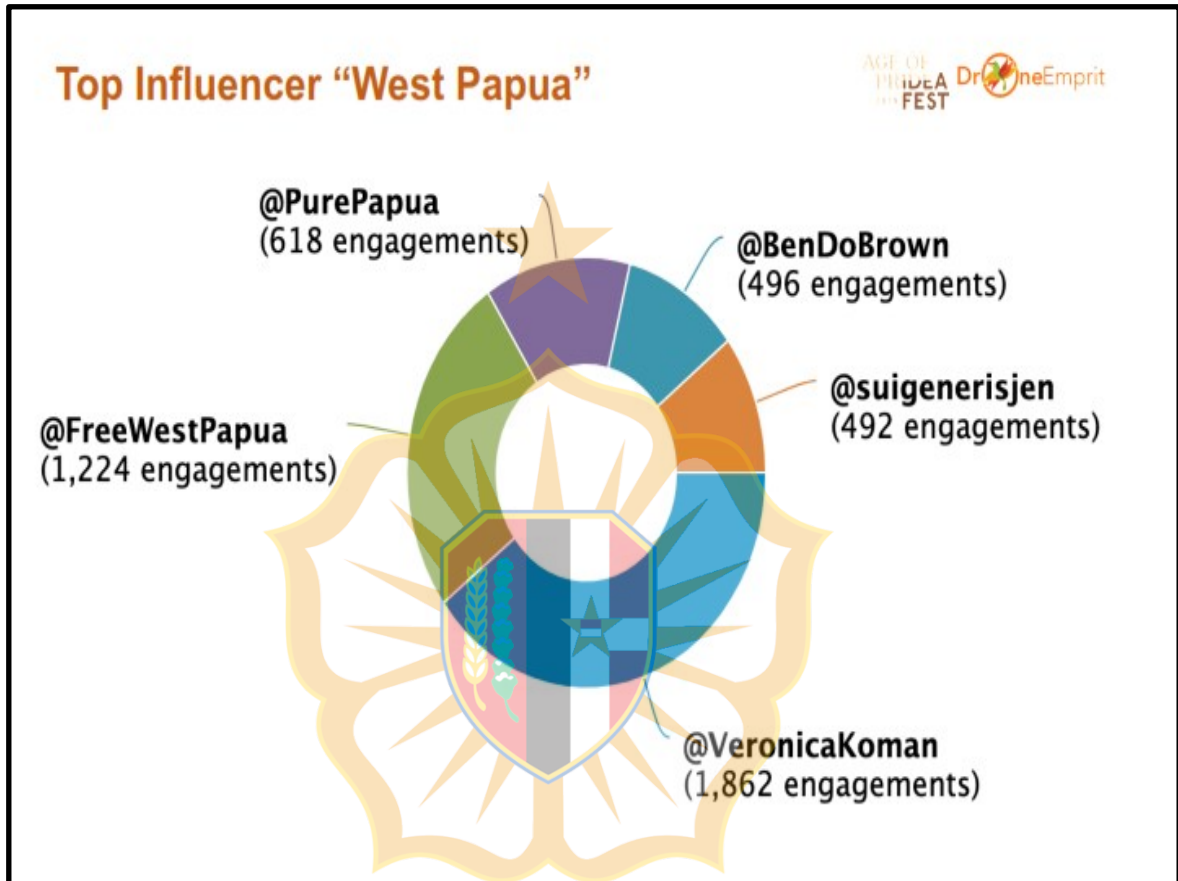
8:47 PM - Sep 3, 2019 - Twitter for iPhone

351 Retweets 360 Likes

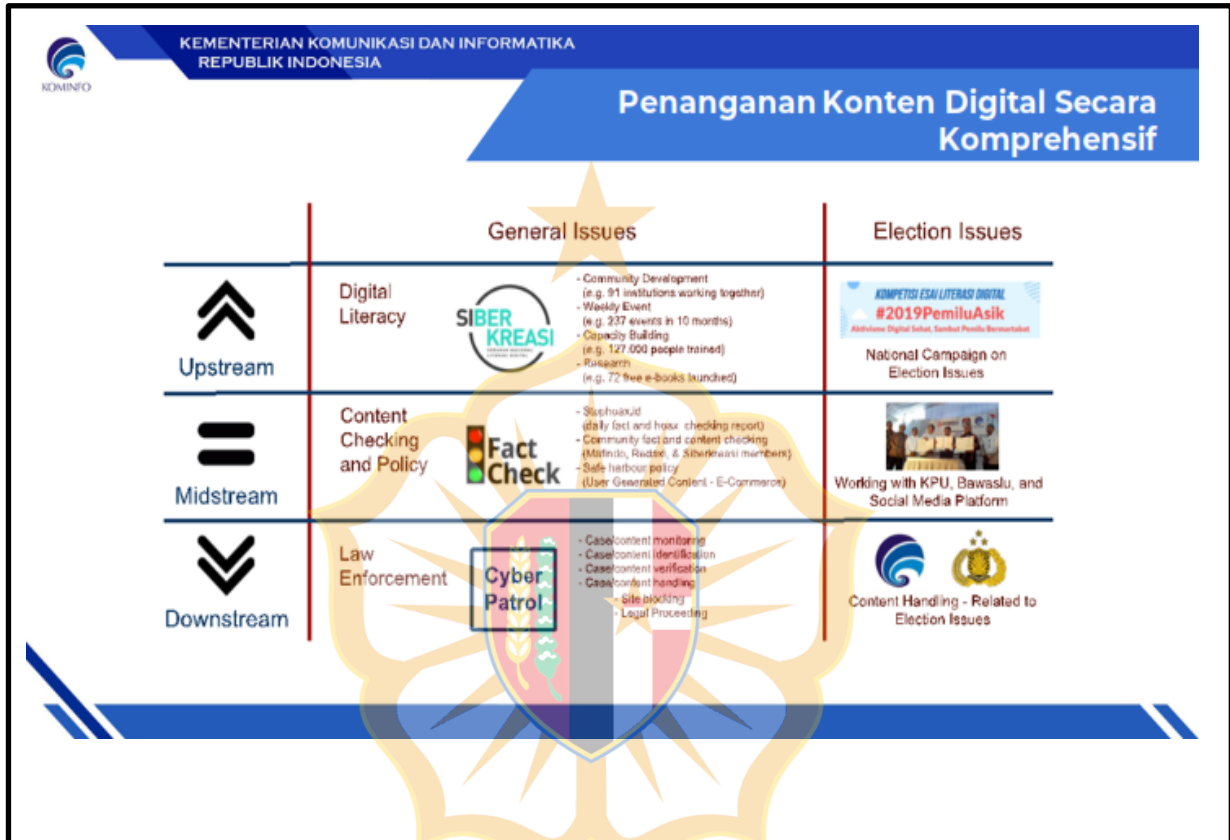
DHARMMA

TANHANA **MANGRVA**

TOP INFLUENCER KAMPANYE PAPUA BARAT



PROSES PENANGANAN PEMERINTAH



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : R. Edi Setiawan, S.H.
2. Pangkat/Korps/NRP : Kolonel Arh / 1910045970470
3. Jabatan dan Kesatuan : Paban VI/Minintel Spamad
4. Tempat dan Tanggal lahir : Yogyakarta, 16 April 1970
5. Agama : Islam
6. Pendidikan
 - a. Umum
 - 1) SD : Tahun 1982
 - 2) SMP : Tahun 1985
 - 3) SMA : Tahun 1988
 - 4) S1 : Tahun 2014
 - b. Militer
 - 1) Dikma/Dikbangum
 - a) Akmil : Tahun 1991
 - b) Sussarcab Arh : Tahun 1991
 - c) Selapa Arhanud : Tahun 2000
 - d) Seskoad : Tahun 2007
 - e) Sespimti Polri : Tahun 2017
 - 2) Dikbangspes
 - a) Susdanrai Arh : Tahun 1993
 - b) Suspa Intel ABRI : Tahun 1996
 - c) Suspa Intel Teknik : Tahun 2000
 - d) Suspaintelstrat : Tahun 2003
 - e) Susdanyon : Tahun 2008
 - f) Susdandim : Tahun 2011

7. Riwayat Jabatan

- a. Sekretaris Pusdik Arhanud : Tahun 2002
- b. Kasimin Pusdik arhanud : Tahun 2003
- c. Kasi Intel Resimen 1/Dam Jaya : Tahun 2003
- d. Danden Arhanud rudal 003/F : Tahun 2004
- e. Kasi intelnik Pusintelad : Tahun 2006
- f. Kabagpamlat Pussenarhanud : Tahun 2007
- g. Danyon Arhanudse 11/ BS : Tahun 2009
- h. Pabandyamin Sinteldam I/BB : Tahun 2010
- i. Dandim 0207/Sml Dam I/BB : Tahun 2011
- j. Kasi Intelrem 033/WP Dam I/BB : Tahun 2012
- k. Kasrem 023/KS dam I/BB : Tahun 2014
- l. Waasintel Kodam I/BB : Tahun 2014
- m. Dosen Gol IV Satinduk Bais : Tahun 2014
- n. Asdiklat Satinduk Bais TNI : Tahun 2016
- o. Paban VI/ Minintel Spamad : Tahun 2018

8. Keluarga

- a. Nama istri : Ir. Cut Siti Hasyimah
- b. Nama anak : 1. Rr. Cindy Safira Setiawan
2. R. Andhika Prameswara Setiawan

9. Judul karya Tulis : **PENGARUH MEDIA SOSIAL PADA ERA GLOBALISASI TERHADAP NASIONALISME**

10. Lain-lain

- a. Penugasan Operasi
- Operasi jaring merah 1993
- b. Tanda kehormatan Negara
 - 1) Satya Lencana kesetiaan VIII Tahun
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun

- 3) Satya Lencana GOM VII (Aceh)
- 4) Satya Lencana Dwidya Sistha

Jakarta , 21 Juli 2020

Penulis



R. Edi Setiawan
Kolonel Arh NRP 1910045970470

